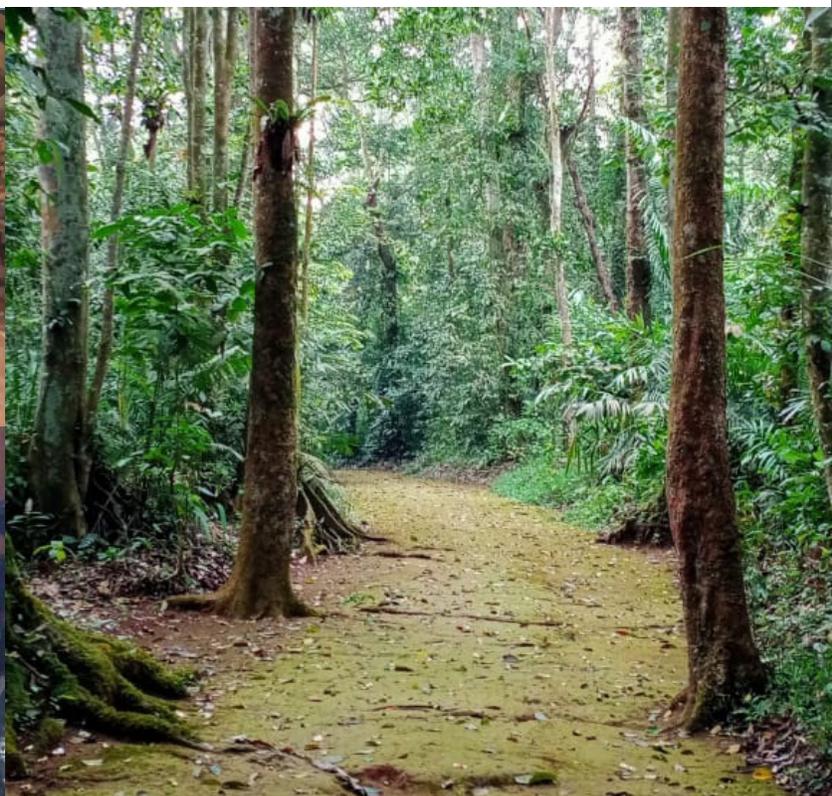




LAPORAN

Studi Perencanaan Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Desa

(Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan)



Studi Perencanaan Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Desa

(Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan)

Penyusun:

Dina Mariana, M.H.

Sukasmanto, M.Si

Kontributor:

Dinda Ahlul Latifah

Iranda Yudhatama

Rajif Dri Angga

Layout: Ipank

IRE Yogyakarta

Desember 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab 1. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perspektif.....	3
1.3. Tujuan	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Lokasi Penelitian	7
Bab 2. Gambaran Umum	
2.1. Desa Cageur.....	8
2.1.1. Kondisi Sosial Ekonomi.....	9
2.1.2. Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Bidang Ekonomi.....	10
2.1.3. Peta Aset dan Potensi Ekonomi Desa.....	11
2.1.4. Peta Lembaga Ekonomi Lokal.....	17
2.1.5. Tata Kelola Ekonomi Lokal.....	18
2.2. Desa Sakerta Timur.....	19
2.2.1. Kondisi Sosial Ekonomi.....	21
2.2.2. Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Bidang Ekonomi.....	25
2.2.3. Peta Aset dan Potensi Ekonomi Desa.....	27
2.2.4. Peta Lembaga Ekonomi Lokal	35
2.2.5. Tata Kelola Ekonomi Lokal.....	39
Bab 3. Business Model untuk Perencanaan Usaha Dalam Pengembangan Ekonomi Desa	
3.1. Penentuan Lingkup Penyusunan Bisnis Model	41
3.2. Perumusan Model Bisnis	42
3.3. Pendekatan Pengembangan Wisata di Desa	44
3.4. Pengembangan Usaha Berbasis Hasil Pemetaan dan <i>Assessment</i> ..	46
3.4.1. Desa Cageur	46
3.4.2. Desa Sakerta Timur	49
3.5. Penyusunan <i>Prototype</i> Bisnis Model	53
3.5.1. Desa Cageur	53
3.5.2. Desa Sakerta Timur	57
3.6. Skema Kerja Sama Antar Pihak	61

Bab 4. Penutup	
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Rekomendasi	63
4.2.1. Integrasi Kawasan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.	63
4.2.2. Peningkatan Kapasitas Lokal	63
4.2.3. Fasilitasi Pemda.....	64
4.2.4. Roadmap Implementasi Bisnis Model.....	64

Daftar Tabel

Tabel 1. Fungsi dan Luas Lahan Desa Cageur	8
Tabel 2. Sektor Peternakan di Desa Cageur	9
Tabel 3. Inventarisasi Aset Desa Cageur	13
Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sakerta Timur	20
Tabel 5. Kepemilikan Ternak	21
Tabel 6. Mekanisme Pembagian Peran dalam Aktivitas Utama Ekowisata Hutan Cageur.....	56
Tabel 7. Mekanisme Pembagian Peran dalam Aktivitas Utama Ekowisata Kampung Tumaritis.....	60
Tabel 8. Alternatif Skema Kerja Sama antar Pihak.....	61

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Demokrasi dalam PEL.....	4
Gambar 2. Fondasi Arus Sirkular dalam Pembangunan Berkelanjutan ..	5
Gambar 3. Kantor Desa Cageur	11
Gambar 4. Kopi Robusta Sanggarung Produk UMKM Dusun Cageur	12
Gambar 5. Produk Olahan Makanan Raginang Singkong	12
Gambar 6. Peta Potensi dan Aset Desa Cageur	16
Gambar 7. Kelompok Seni Gemyung Tafakur di Dusun Cageur	18
Gambar 8. Kantor Desa Sakerta Timur	19
Gambar 9. Petani di Persawahan Desa Sakerta Timur.....	21
Gambar 10. Potensi Wisata Desa Sakerta Timur	25
Gambar 11. Arena sirkuit yang terbengkalai	27
Gambar 12. Kolam renang desa yang tidak terawat.....	27
Gambar 13. Salah satu kolam ikan milik warga	28
Gambar 14. Lanskap persawahan di Desa Sakerta Timur.....	28
Gambar 15. Produk Sale Pisang.....	29
Gambar 16. Proses pengemasan sale pisang melibatkan ibu-ibu sekitar dusun	29
Gambar 17. Produk gula aren.....	29
Gambar 18. Produk gula aren basah	29
Gambar 19. Keripik singkong produksi ibu Wiwin dari Dusun Wage.....	29
Gambar 20. Gambar becak singkong.....	29
Gambar 21. Homestay Bu Entin	30
Gambar 22. View depan homestay	30
Gambar 23. Bagan Kondisi Tata Kelola Ekonomi Desa Sakerta Timur.....	39

Gambar 24. Lingkup Penyusunan Bisnis Model dalam Skema Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Waduk Darma	41
Gambar 25. Pendekatan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.....	45
Gambar 26. Analisis Penentuan Alternatif Pengembangan Usaha Desa Cageur	48
Gambar 27. Matriks Penentuan Alternatif Pengembangan Usaha Desa Sakerta Timur.....	52
Gambar 28. Prototype Bisnis Model Ekowisata Desa Cageur.....	54
Gambar 29. Prototype Bisnis Model Ekowisata “Kampung Tumaritis” Desa Sakerta Timur .	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk melakukan penataan sesuai dengan lokalitas yang ada. Desa memiliki kewenangan yang jauh lebih besar, terutama dalam hal mengelola potensi dan aset yang dimiliki, guna dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh entitas yang ada di desa, termasuk dalam rangka penguatan kapasitas fiskal desa. Semangat UU Desa untuk Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Desa dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki oleh Desa pada prinsipnya ingin mendudukkan kedaulatan Desa atas sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Desa.

Banyak Pemerintah Daerah dan Desa yang memanfaatkan peluang kehadiran UU Desa untuk melakukan perubahan di tingkat lokal, termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan yang berbasis desa. Hal ini dapat dilihat dari prioritas pembangunan daerah yang banyak berfokus pada upaya penguatan desa sebagaimana tertulis dalam Perda No. 7 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 Kabupaten Kuningan dalam bentuk pembangunan desa *Pinunjul* yang akan memprioritaskan 100 desa dari 361 desa untuk dioptimalkan dan ditingkatkan kesejahteraan ekonominya dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan tersebut didasarkan pada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan 2005-2025, pembangunan kabupaten Kuningan akan menitikberatkan pada sektor pertanian atau agropolitan dan pengembangan pariwisata yang berbasis pariwisata alam dan budaya sebagai sektor unggulan daerah.

Selain itu Kabupaten Kuningan juga telah mendeklarasikan konsep

pembangunan sebagai Kabupaten Konservasi pada tahun 2006 dengan penerapan azas-azas konservasi dalam seluruh gerak pembangunan di Kabupaten Kuningan. Sehingga semua kebijakan dan pola pembangunan yang ada di Kabupaten Kuningan ini harus mampu menjaga keseimbangan antara laju di sektor ekonomi, kelestarian ekologi dan pengembangan sosial budaya yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan yang berbasis pada desa seperti yang termuat dalam Visi RPJMD 2018-2023 untuk lima tahun mendatang yaitu Kuningan Ma'mur, Agamis, Pinunjul (MAJU) berbasis desa 2023.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, salah satu misi pemerintah Kabupaten Kuningan adalah mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.

Kabupaten Kuningan juga telah mempunyai kebijakan terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam bentuk Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa yang intinya adalah pembangunan antar desa dalam suatu kawasan yang sesuai dengan tata ruang Kabupaten dan bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang ada dalam kawasan tersebut.

Bahkan dalam upaya untuk mengakselerasi percepatan pembangunan daerah yang berbasis pada desa, pemerintah Kabupaten Kuningan telah membuat Peraturan Bupati No 1 Tahun 2019 tentang Desa Pinunjul yang secara substansi merupakan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada keunggulan (*pinunjul*) karakteristik lokal dan menjadi dasar hukum bagi sinergitas perencanaan dan implementasi pembangunan berbasis desa. Adapun sasaran dari pembentukan desa pinunjul adalah desa-desa yang mempunyai keunggulan lokal baik berupa potensi atau kegiatan yang telah eksis dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan utama ekonomi lokal. Desa-desa pinunjul tersebut dikategorisasi dalam 11 bidang, antara lain; bidang wisata, agro, pendidikan, UKM, Industri, budaya, dll. Dari 100 desa Pinunjul yang diprioritaskan untuk dibangun selama lima tahun , 25 desa diantaranya merupakan desa wisata pinunjul.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan relatif tinggi yakni sebesar 6,43 persen. Namun sayangnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut, masih menyisakan permasalahan dan sekaligus tantangan terberat yang dihadapi Kabupaten Kuningan yakni masalah kemiskinan, di mana berdasarkan data statistik, Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten nomer dua termiskin di Propinsi Jawa Barat dengan angka kemiskinan sebesar 12,22 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 131,16 ribu jiwa. Selain permasalahan kemiskinan, Kabupaten Kuningan juga memiliki permasalahan dan sekaligus tantangan terkait dengan Indek Pembangunan Manusia sebesar 68,55 yang masih berada di bawah IPM Propinsi Jawa Barat yakni sebesar 71,30 (BPS, 2019).

Apalagi jika dilihat dari postur APBD Kabupaten Kuningan yang relatif terbatas dalam

upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan IPM. Hal ini dapat dilihat dari realisasi APBD Kabupaten Kuningan, pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp. 2.529,67milyar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan penyumbang terbesar dari APBD yakni sebesar Rp. 1.197,19milyar atau sekitar 47,51persen. Jika dirinci lebih jauh dapat dilihat bahwa sumber pendapatan pemerintah Kabupaten Kuningan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada tahun 2018 masih menduduki prosentase terbesar yakni 65,70, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah hanya berkontribusi sebesar 11, 99 persen. Sementara realisasi belanja operasional Kabupaten Kuningan pada tahun 2018 sebagian besar masih terserap dalam belanja pegawai yakni sebesar 54,11 persen, sisanya dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar 17, 45 persen, belanja barang dan jasa sebesar 25,91 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 0,48 persen (BPS, 2019).

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata. Salah satu proyek pembangunan pariwisata yang tengah berjalan di Kabupaten Kuningan adalah proyek revitalisasi waduk Darma sebagai destinasi wisata bertaraf internasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat bersama kementerian PUPR.

Berpijak dari konteks tersebut, maka dilakukan studi ini menekankan pada upaya menemukenali potensi pengembangan ekonomi lokal yang dapat mendukung pembangunan kawasan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kawasan Waduk Darma.

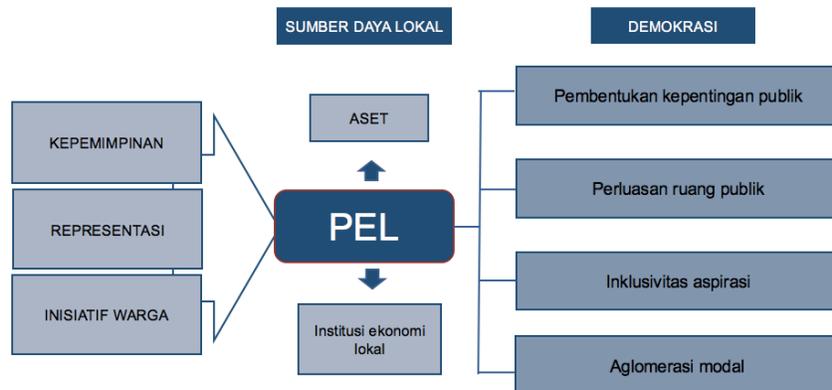
1.2. Perspektif

Studi ini dilakukan dengan instrumen yang menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kawasan perdesaan. Artinya, terdapat perspektif *social inclusion* dan *sustainable development* yang menjadi perhatian penting dalam proses penyusunan *business model* dan *business plan* yang menjadi output dalam kegiatan studi ini.

Dalam konsep yang ditulis oleh IRE (2017), demokrasi menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Demokrasi yang dipahami di sini menekankan pada partisipasi masyarakat desa sebagai prinsip mendasar dalam proses pembuatan kebijakan dan program pembangunan. Partisipasi masyarakat desa merupakan hal yang utama dan mendasar dalam proses pembuatan kebijakan dan program pembangunan kawasan tersebut, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan (Antlov dalam Mariana et al., 2017). Studi IRE tersebut mengkonfirmasi bahwa desa-desa yang tumbuh inisiatif dari warga aktif (*active citizen*) jauh lebih mampu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah desa dan mengelola sumberdaya lokal yang ada dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan.

PEL dalam kerangka demokrasi dapat dijelaskan secara sederhana dalam bagan berikut:

Gambar 1. Kerangka Demokrasi dalam PEL



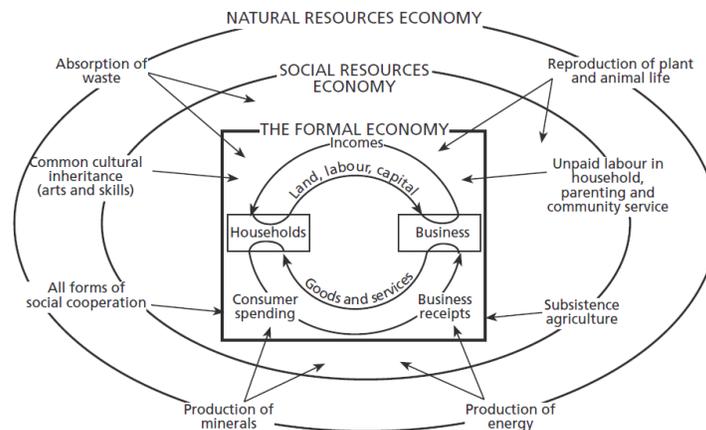
Sumber: IRE, 2019

Perhatian besar juga ditujukan terhadap potensi pengembangan potensi/aset desa dalam rangka menjawab tantangan pembangunan lokal. Secara konseptual aset desa dalam studi ini, mengacu pada definisi aset pada UU No. 6 Tahun 2014 yang mengartikan aset desa merupakan barang milik desa yang bersumber dari kekayaan asli desa, diperoleh atau dibeli memakai APBDesa, atau hibah dari pemerintah di atasnya dan pihak lain secara sah. Selain mengacu pada konsep tersebut, studi ini juga mengacu pada konsep *pentagon asset* yang dikembangkan Robert Chambers dan Conway (1992) yang mengartikan aset merupakan elemen penting dalam upaya membangun penghidupan berkelanjutan. Aset dalam konteks ini diartikan secara lebih luas yakni, aset alam (*natural asset*), aset fisik (*physical asset*), aset social (*social asset*), aset manusia (*human asset*), dan aset keuangan (*financial asset*).

Social inclusion digunakan untuk memastikan akses kelompok-kelompok marginal dan rentan di desa terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi warga desa. Cukup banyak ahli yang mengurai tentang definisi *social inclusion* dalam konteks pembangunan, dimana pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi akan memunculkan distorsi dalam pembangunan (*distorted development*). Distorsi ini nampak dari eksese pembangunan yang memunculkan kelompok-kelompok yang kalah bersaing dan tertinggal (Midgley, 1995) serta memunculkan praktik eksklusi sosial terhadap mereka yang tidak memiliki akses sosial politik kepada sumberdaya sosial, kurang berpartisipasi dalam kegiatan (Warsilah, 2015). PEL yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan erat kaitannya dengan perspektif inklusifitas guna memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam kerangka pembangunan (*No One Left Behind*).

Sedangkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep yang menjadi perhatian penting juga dalam PEL di Kabupaten Kuningan mengingat perhatian Pemerintah Kabupaten yang sangat kuat dalam aspek menjaga kelestarian lingkungan (ekologi). Pembangunan ekonomi memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup atau dengan kata lain kualitas lingkungan hidup mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2011). Keberlanjutan adalah istilah yang dipilih untuk menjembatani jurang antara pembangunan dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan dalam Laporan Komisi Brundtland sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Rogers et al., 2007). Dalam perkembangannya, konsep pembangunan berkelanjutan terus dikembangkan oleh banyak ahli, dimana teori yang berkembang memusatkan perhatian pada 3 isu utama dalam pembangunan, yaitu: pertumbuhan ekonomi, penguatan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Namun konsep *green economics* menjadi perhatian penting dalam studi ini, guna memastikan agar pengembangan ekonomi lokal yang digunakan sebagai pendekatan dalam studi ini lebih memperhitungkan kapasitas lingkungan dalam proses bisnis (Hutchinson, et.al., 2002). Dalam perspektif *green economics*, kepentingan lingkungan melampaui kepentingan ekonomi yang tergambar dalam buku *The Politics of Money* sebagai berikut:

Gambar 2. Fondasi Arus Sirkular dalam Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Hutchinson, 2002

Meski ruang lingkup studi ini dilakukan pada wilayah desa, akan tetapi *business plan* dan *business model* yang dikembangkan sudah berorientasi untuk mendukung upaya pengembangan kawasan Waduk Darma. Dalam konsep pembangunan kawasan perdesaan yang komprehensif, pendekatan “desa membangun” dan “membangun desa” adalah dua pendekatan yang diusung untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa. Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa

pembangunan kawasan perdesaan diartikan sebagai pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Secara sederhana, konsep “membangun desa” lebih menitik beratkan pada pentingnya peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan desa. Sedangkan konsep “desa membangun” lebih menitikberatkan pada peran desa untuk menggerakkan sumber daya lokal dalam pembangunan. Pembangunan kawasan perdesaan idealnya tumbuh seiring dengan kebutuhan desa-desa dalam kawasan untuk saling bersinergi, baik untuk pengembangan potensi maupun untuk menjawab tantangan lokal. Tanpa adanya kebutuhan tersebut, dikhawatirkan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa internalisasi dan implementasi yang kuat di level kawasan. Studi IRE (2020) memotret pentingnya mendorong daerah untuk menetapkan PKP dengan menggunakan pendekatan inklusif sesuai mandat UU Desa, yaitu:

1. Menghormati kedaulatan desa sebagai bentuk pelaksanaan asas rekognisi dan subsidiaritas terkait pengaturan desa;
2. Menjamin akses dan distribusi sumber daya secara berkeadilan;
3. Memperkuat partisipasi lokal, termasuk warga dari kelompok marginal dan rentan.

1.3. Tujuan

Secara umum studi ini dilakukan dalam rangka penyusunan *business model* dan *business plan* yang akan dikembangkan oleh desa yang menjadi lokasi studi untuk memperkuat pembangunan kawasan Waduk Darma. Secara khusus, studi ini dilakukan dalam rangka:

- a. Memetakan potensi dan asset desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan dalam penyusunan *business model* dan *business plan* bagi percepatan pembangunan ekonomi desa dan Kawasan perdesaan;
- b. Menemukenali peluang dan tantangan PEL desa dalam kerangka pembangunan kawasan Waduk Darma;
- c. Menyusun *bisnis model* dan *bisnis plan* desa sebagai basis dari pembangunan ekonomi Desa Pinunjul dan Kawasan Perdesaan.

1.4. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa dalam rangkai akselerasi pembangunan daerah yang berbasis pada desa, pemerintah Kabupaten Kuningan telah membuat Peraturan Bupati No 1 Tahun 2019 tentang Desa Pinunjul yang secara

substansi merupakan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada keunggulan (*pinunjul*) karakteristik lokal dan menjadi dasar hukum bagi sinergitas perencanaan dan implementasi pembangunan berbasis desa.

Berpijak pada konteks permasalahan tersebut, maka menjadi penting untuk menggali potensi dan asset desa sebagai langkah awal dalam penyusunan *road map business plan dan business model* desa *pinunjul* di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.

- a. Apa saja potensi dan asset desa yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal dan sekaligus menjadi keunggulan komparatif desa ?
- b. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan asset desa tersebut ?

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau konsep yang akan menjelaskan fenomena sosial (Creswell, 2010). Metode ini dipilih dalam penelitian ini, dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat lebih dalam mengeksplorasi terkait perspektif, pengetahuan dan praktik sosial para informannya (Flick,1998) dalam konteks memetakan permasalahan, potensi dan asset yang ada di desa.

Penelitian secara deskriptif kualitatif ini akan mencari data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan penelitian yaitu Kepala Desa (Kuwu), perangkat desa, pengurus BUMDesa, pengurus POKDARWIS, dan pelaku ekonomi lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen baik yang berupa teks maupun visual.

1.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam studi ini ada dua desa yang berada di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan yaitu:

1. Desa Sakerta Timur;
2. Desa Cageur.

Bab 2

Gambaran Umum

2.1. Desa Cageur

Desa Cageur merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Darma, yang terletak 8 km ke arah Selatan dari kota kecamatan dan 24 km ke arah selatan dari kota kabupaten dengan jumlah penduduk sejumlah 566 KK dan cacah jiwa sebesar 1.791 jiwa. Desa Cageur mempunyai luas wilayah seluas 178 hektar yang terbagi berdasarkan peruntukkannya sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Fungsi dan Luas Lahan Desa Cageur

Fungsi lahan	Luas
Pemukiman	9 Ha
Pertanian sawah	28 Ha
Perkebuan	30 Ha
Perkantoran	1 Ha
Lainnya	75 Ha

Sumber : RPJMDes 2019-2025 dan Profi Desa 2019

Secara demografis Desa Cageur berbatasan dengan empat desa, yakni disebelah Utara dengan Desa Sakerta Barat, sebelah selatan dengan Desa Tugumulya, sebelah Barat dengan Desa Sukarasa dan di sebelah Timur dengan Desa Bunigeulis. Desa Cageur terletak pada ketinggian 750 dpl dengan suhu rata-rata 24-30°C. Kondisi alam tersebut mempengaruhi pola penghidupan warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani lahan sawah dan lahan kering. Sekitar 854 warga Cageur adalah petani, sebagian lainnya menjadi pedagang (167 orang), buruh (129 orang), tukang (29 orang), PNS (36 orang), dan guru (20 orang). Sementara kelompok rentan dan marginal desa untuk penyandang disabilitas sejumlah 7 orang dengan berbagai jenis disabilitas dan

terdapat 25 perempuan yang termasuk kategori miskin, dan lansia. Secara administratif wilayah Desa Cageur terdiri dari dua (2) dusun yakni Dusun Cageur (5 RT) dan Dusun Dayeuh Kolot (4 RT) (RPJM Desa Cageur, 2019).

2.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi Desa Cageur secara garis besar bercorak agraris. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya komoditas pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Cageur yang sebagian besar merupakan petani baik petani pemilik lahan maupun buruh tani. Mereka menanam tanaman pangan, seperti padi, jagung, singkong, umbi-umbian, anjeli, dan lain-lain. Selain tanaman pangan, di kebun-kebun warga banyak ditanamani tanaman lada dan kopi dengan jenis kopi robusta. Hanya saja menurut penuturan Edi Suhanna selaku produsen kopi, tanaman kopi di Desa Cageur relatif belum menjadi sumber utama bagi para petani. Sehingga budidaya tanaman kopi dan proses pengolahan belum berjalan optimal. Di sisi lain, pemerintah desa juga belum mempunyai data terkait luasan lahan dan jumlah komoditas kopi yang ada di Desa Cageur. Data yang tersedia masih merupakan data pemanfaatan lahan secara umum. Pada sektor pertanian, selain mengandalkan komoditas pertanian, seperti padi, palawija, anjeli, dan lain sebagainya, para petani di Desa Cageur rata-rata juga beternak beberapa jenis hewan. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder berikut ini:

Tabel 2. Sektor Peternakan di Desa Cageur

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Sapi	127 ekor
2	Kambing	117
3	Ayam	500
4	Itik	200

Diolah dari dokumen RPJM Desa Cageur, 2019

Secara lebih spesifik hasil assement menemukan beberapa permasalahan sosial ekonomi yang menjadi kendala utama dalam pengembangan ekonomi lokal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi pemuda terutama di sektor produksi olahan komoditas pertanian dan jasa ekonomi kreatif, seperti pariwisata, kuliner, dll. Hal ini membawa konsekuensi logis sebagian dari pemuda atau sekitar 30 persen memilih migrasi atau urbanisasi ke kota-kota besar baik di sektor formal maupun informal.
2. Produktivitas pertanian relatif masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan air untuk mengairi lahan-lahan pertanian. Sebagai catatan sebagian besar lahan pertanian di Desa Cageur adalah lahan kering dan sawah tadah hujan. Selain itu tenaga kerja di sektor pertanian didominasi oleh usia di atas 40 tahun dan relatif jarang pemuda usia di bawah 30 tahun memilih menjadi petani.

3. Potensi dan aset ekonomi yang dimiliki desa belum mampu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Peran BUM Desa Sangga Buana yang baru berusia tiga bulan belum memungkinkan menjadi entitas bisnis yang mampu memberdayakan dan mengelola potensi dan aset desa tersebut. BUM Desa Sangga Buana saat ini baru mampu memfasilitasi pemasaran. Sebagian kecil dari produk-produk pelaku usaha kecil dan produk pupuk organik olahan Kelompok Tani Cageur 2. Selain itu, pada saat penelitian ini berlangsung, BUM Desa Sangga Buana belum mendapatkan penyertaan modal dari pihak pemerintah desa dan juga belum mempunyai visi serta konsep bisnis terkait pengembangan ekonomi lokal. Padahal, salah satu potensi dan aset desa yang dapat menjadi keunggulan adalah sumber daya alamnya berupa hutan konservasi seluas kurang lebih 14 hektare. Sekitar 12,62 hektare di antaranya merupakan milik perhutani yang di dalamnya berisi keanekaragaman hayati yang relatif masih terjaga. Di kawasan hutan ini juga terdapat situs budaya berupa makam tokoh religi Mbah Eyang Dalem Cageur atau sebagian masyarakat menyebutnya Eyang Satari. Selain hutan milik perhutani tersebut, Desa Cageur sendiri mempunyai aset desa berupa hutan seluas 1 hektare yang terletak di Dusun Dayeuh Kolot dan juga berfungsi sebagai hutan konservasi terutama konservasi mata air.
4. Pelaku ekonomi kecil terutama kelompok perempuan miskin relatif belum optimal didampingi dan difasilitasi oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, baik dari aspek permodalan maupun dari aspek peningkatan kapasitas.

2.1.2 Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Bidang Ekonomi

Mengacu pada dokumen kebijakan RPJM Desa Cageur Tahun 2019-2025, arah pembangunan ekonomi Desa Cageur **adalah mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal dalam rangka mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat**. Dalam upaya mencapai misi tersebut strategi pembangunan yang dilakukan oleh Desa Cageur antara lain; (1) meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa; (2) melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri.

Meskipun demikian, dalam implementasinya Pemerintah Desa Cageur relatif belum mampu mengoptimalkan potensi dan aset desa yang ada sebagai sumber daya ekonomi lokal yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PADesa. Hal ini sebagaimana penuturan dari Kepala Desa Cageur Didi Muhadi yang menyatakan bahwa permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi oleh Desa Cageur, antara lain: (1) belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa; (2) belum adanya pemasukan dana secara maksimal; (3) terbatasnya dana untuk modal; dan (4) belum adanya peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Gambar 3. Kantor Desa Cageur



Sumber: Profil Desa Cageur

Apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut, terkonfirmasi dari postur APB Desa Cageur Tahun 2020, dimana sumber pendapatan terbesar dari Desa Cageur masih bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 767.725 juta, dari ADD sebesar Rp, 329.910 juta dan dari PADes sebesar Rp 53 juta.

Di sisi lain dari, aspek tata kelola kelembagaan ekonomi desa, Pemerintah Desa Cageur baru mengaktifkan kembali BUM Desa Sangga Buana yang relatif belum memiliki visi dan perencanaan bisnis. BUM Desa Sangga Buana saat ini baru mengelola satu unit kios milik desa untuk dijadikan kantor sekaligus warung yang memasarkan produk-produk masyarakat Desa Cageur, seperti Kopi Sanggarung, rengginang singkong, pupuk organik, baik secara *offline* maupun *online*.

2.1.3 Peta Aset dan Potensi Ekonomi Desa

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang ada, masing-masing dusun memiliki aset dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal. Di Dusun Cageur terdapat hutan milik perhutani seluas 12,62 hektare yang berfungsi sebagai hutan dan di dalam hutan tersebut terdapat makam Mbah Eyang Dalem Cageur yang merupakan situs cagar budaya yang secara tradisi menjadi tempat ziarah (wisata religi) masyarakat dari berbagai daerah. Selain hutan, aset sumber daya alam lainnya adalah adanya mata air dan lahan persawahan. Dusun Cageur juga mempunyai aset berupa komoditas pertanian berupa, kopi robusta, singkong, anjeli, padi. Komoditas pertanian yang saat ini tengah dikembangkan menjadi produk olahan antara lain; (1) Kopi Robusta dengan merek Sanggarung (diambil dari nama hulu Sungai Sanggarung yang terletak di Dusun Cageur; (2) Olahan gula aren dan minuman lahang. Selain itu juga terdapat kelompok seni tradisi Gembyung yang bernama kelompok Tafakur.

Sementara di Dusun Dayeuh Kolot juga terdapat hutan milik desa atau biasa disebut tanah GG yang berfungsi sebagai hutan lindung seluas 1 ha dan lahan persawahan. Selain aset sumberdaya alam tersebut, di Dusun Dayeuh Kolot juga terdapat aset

**Gambar 4. Kopi Robusta Sanggarung
produk UMKM Dusun Cageur**



**Gambar 5. Produk olahan makanan Raginang
Singkong**



komoditas pertanian seperti; (1) pohon aren; (2) kopi; (3) anjeli;(4) padi; (5) Singkong, dll. Komoditas pertanian yang telah diolah menjadi olahan makanan antara lain; (1) Gula aren; (2) Rengginang singkong; (3) Wajid Anjeli yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani Mekar Mulya. Selain itu di Dusun Dayeuh Kolot juga ditemukan aset sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan sebagai pengrajin gula aren (16 orang); pengrajin anyaman bambu (3 orang); pelaku UMKM olahan makanan; dan kelompok seni tayub.

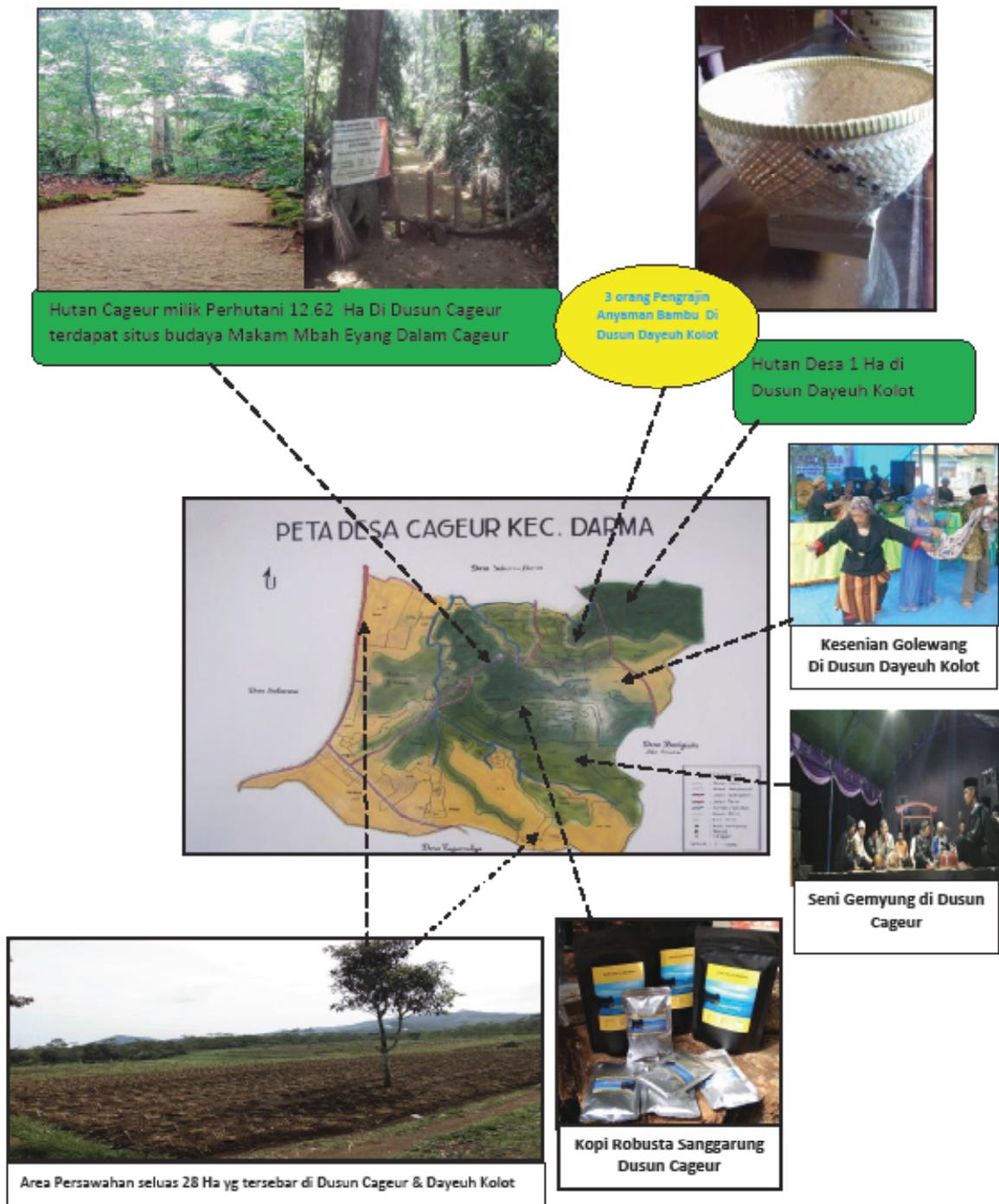
Tabel 3. Inventarisasi Aset Desa Cageur

No	Aset Desa	Jenis	Jumlah/ Luasan	Lokasi	Kondisi	Pemanfaatan
1	Aset Sumberdaya alam	Hutan milik perhutani yang di dalamnya terdapat Situs Budaya berupa makam Mbah Eyang Dalem Cageur	12.62 hektare	Dusun Cageur	Kondisi hutan relatif terjaga. Hal ini dikarenakan selain karena adanya peraturan dari perhutani juga disebabkan masih adanya <i>pamali</i> yang melarang warga untuk merusak hutan tersebut	Dijadikan untuk hutan lindung tempat ziarah (rencana akan dikelola oleh Pokdarwis JAGAWAN bekerjasama dengan BUM Desa dan Perhutani Pernah diteliti oleh IPB terkait jenis-jenis tanamana termasuk anggrek hutan. Namun hasil penelitian belum dimiliki oleh desa
		Hutan lindung milik desa (Tanah GG)	1 hektare	Dusun Dayeuh Kolot	Kondisi hutan relatif masih terjaga. Meskipun desa belum memiliki Perdes tentang konservasi, namun karena masih adanya kearifan lokal berupa <i>pamali</i> yang melarang warga merusak hutan, maka kondisi hutan tetap terjaga kelestariannya	Dijadikan hutan lindung untuk menjaga mata air dan Sebagian pohon aren disadap oleh petani untuk diolah menjadi gula aren
		Sawah milik desa (Kas Desa) merupakan	6,5 hektare	Tersebar di Dusun Cageur dan	Sawah tadah hujan dan produktif. Panen padi 1 -	Sebagian besar disewakan ke warga dengan sistem digilir

		tanah bengkok		Dusun Dayeuh Kolot	2 tahun sekali dan diselingi palawija (singkong, dll)	dengan harga sewa per 50 bata/tahun sebesar Rp 400.000 yang sebagian masuk menjadi PADes
2	Aset fisik	Kios desa	4 Unit	Dusun Cageur (eks terminal)	Relatif baik dan terawat	2 unit disewakan kepada warga untuk menjadi warung 1 unit dikelola BUM Desa sebagai kantor dan warung kopi dan menampung serta menjual sebagian produk lokal 1 unit dijadikan tempat belajar <i>online</i> secara gratis untuk anak sekolah difasilitasi desa
3	Asset Sumberdaya manusia	Relatif masih banyak pemuda yang tinggal di desa. Para pemuda yang aktif di Karang Taruna tersebut ada yang menjadi pengurus BUMDesa dan ada yang menjadi pengurus Pokdarwis Jagawana Ada dua Kelompok tani yakni KWT Pengrajin gula aren Pengrajin anyaman bamboo (3) orang yang merupakan perempuan miskin dengan rata-rata pendapatan	6 orang pemuda tergabung sebagai pengurus BUMDes 16 Pemuda tergabung sebagai pengurus POKDARWIS JAGAWANA 2 Kelompok Tani (Kelompok Tani Gageur 1 & Kelp. Tani Cageur 2) 3 orang perempuan pengrajin bambu 18 orang pengrajin gula aren 2 orang perempuan pengrajin			Saat ini BUMDes baru mengelola 1 unit warung dan memasarkan produk olahan Desa Cageur BUMDes baru dibentuk sekitar bulan Agustus dan belum ada penyertaan modal. Baru tahun 2021 rencana akan ada penyertaan modal dari desa. BUMDes belum memiliki Bisnis plan POKDARWIS JAGAWANA relatif baru terbentuk sekitar 2 bulan dan belum mendapatkan dukungan modal dari pihak desa maupun kabupaten. Pelatihan sudah

		per bulan Rp 600 ribu Pelaku UMKM olahan makanan sebagian besar adalah perempuan miskin dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 500 ribu-1 juta per bulan				pernah dilakukan oleh Dinas Pariwisata
4	Aset modal sosial budaya	Ada beberapa kelompok kesenian tradisi: Seni Gembyung dan Seni Tayub Ada tradisi <i>Bebarit</i> (pada saat ulang tahun desa)	Rata-rata pelaku seni tersebut sudah berusia lanjut	Dusun Cageur (Kelompok Seni Gembyung Tafakur di bawah pimpinan Bapak Aja) Dusun Dayeuh Kolot	Masih aktif terutama pada saat bulan Maulid dan ditanggap pada saat ada acara pernikahan dan sunatan	Ada dukungan peralatan dan pembinaan dari Pemdes
5	Aset keuangan	Dana Desa ADD	Rp 767.725.000			
		ADD	Rp 329.910.000			
		PADes	Rp 53.000.000, -			

Gambar 6. Peta Potensi dan Aset Desa Cageur



2.1.4 Peta Lembaga Ekonomi Lokal

Secara kelembagaan ekonomi, hasil studi menunjukkan bahwa entitas ekonomi di Desa Cageur masih didominasi oleh bentuk-bentuk usaha bersama, seperti; (1) Kelompok Tani; (2) Koperasi dan kelompok simpan-pinjam/KUAP; (3) Pokdarwis Jagawana, dan lain lain. Selain itu juga pelaku-pelaku usaha kecil yang berbasis individu dan industri rumahan, seperti; (1) pengrajin gula aren sebanyak 18 orang; (2) pengrajin anyaman bambu sejumlah 3 orang; (3) produsen kopi, 1 orang; (4) pengrajin olahan makanan rangginang singkong sejumlah 2 orang. Serta beberapa wiraswasta UMKM yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan seperti: toko, warung makan, bengkel, konveksi, dan lain lain. (RPJM Desa Cageur, 2019 dan hasil wawancara).

Sektor pertanian masih menjadi sektor primer sebagai sumber penghidupan sebagian besar warga Desa Cageur dan bentuk-bentuk ekonomi ekstraktif hanya dilakukan oleh satu perusahaan BUMN, yakni pihak PERHUTANI dan selama *assessment* tidak ditemukan adanya perusahaan swasta lainnya terutama berupa kekuatan korporasi atau perusahaan bermodal besar yang bergerak di sektor agroindustri ataupun agrowisata.

Di sisi lain, BUM Desa sebagai Lembaga ekonomi desa relatif belum berjalan optimal untuk menjadi kekuatan utama penggerak ekonomi desa. BUM Desa yang diresmikan pada bulan Agustus 2020 dengan nama Sangga Buana ini baru mengelola satu unit usaha dalam bentuk kios milik desa yang memasarkan produk-produk lokal baik secara *offline* maupun *online*. Meskipun demikian, para pengurus BUM Desa yang terdiri dari 6 enam pemuda ini mempunyai keinginan untuk menjadikan BUM Desa Sangga Buana sebagai unit bisnis yang berbasis pada pengembangan potensi dan aset lokal Desa Cageur.

Demikian pula dengan lembaga pengelola wisata desa atau Pokdarwis Jagawana juga relatif baru terbentuk dan belum mempunyai konsep bisnis terkait pengembangan wisata di Desa Cageur. Meskipun demikian, mereka berharap dapat mengembangkan paket-paket wisata berbasis agro wisata, budaya, wisata edukasi dan wisata lingkungan (ekowisata). Saat ini mereka tengah mempersiapkan diri untuk bekerjasama dengan pihak PERHUTANI KRPH Haurkuning selaku pengelola kawasan hutan Cageur yang memiliki status sebagai kawasan hutan berkelas konservasi tinggi. Bentuk kerjasama ini butuh difasilitasi oleh pihak pemerintah desa dan pemerintah kabupaten agar mempunyai kekuatan legalitas formal yang kuat dan dapat mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Cageur.

Selain itu, di Desa Cageur terdapat satu kelompok tani yakni Kelompok Tani Cageur 2 yang telah berinisiatif memproduksi pupuk organik bersumber dari kotoran hewan (KOHE) kambing yang pemasarannya dikerjasamakan dengan pihak BUM Desa. Bahkan pemasarannya sudah sampai ke luar desa. Demikian pula dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Mulya yang telah mulai berinisiatif memproduksi olahan hasil pertanian anjeli (*coix lacryma-jobi*) yang melimpah di Desa Cageur menjadi makanan Wajid. Meskipun menurut mereka dukungan yang dilakukan pemerintah desa dan kabupaten baik dalam bentuk permodalan maupun pendampingan relatif belum optimal.

Di samping, kelembagaan ekonomi, di Desa Cageur juga terdapat potensi dan aset kelembagaan sosial budaya berupa, kesenian tradisi yang merupakan warisan dari nenek moyang (buhun) yang sampai saat ini relatif masih tetap dilestarikan. Beberapa bentuk kesenian tradisi tersebut antara lain; (1) Seni Gemyung yang terdapat di Dusun Cageur dan Dusun Dayeuh Kolot; (2) Seni Golewang yang terdapat hanya di Dusun Dayeuh Kolot; (3) Seni Calung, dll. Hampir semua aktivitas kesenian tradisi ini dipentaskan pada *event-event* tertentu di Desa Cageur, seperti pada saat pesta pernikahan, hajatan sunatan, bulan Maulid, dan juga pada saat melakukan babarit

Gambar 7. Kelompok Seni Gemyung Tafakur di Dusun Cageur



yaitu tradisi syukuran menjelang musim tanam satu tahun sekali, yang dalam perkembangannya dijadikan ajang pesta rakyat dalam memperingati hari ulang tahun desa Cageur. Menurut Aja, salah seorang sesepuh pegiat seni tradisi, bentuk-bentuk kesenian yang ada di Desa Cageur merupakan bentuk seni tradisi Sunda yang bernafaskan Islam atau merupakan bentuk akulturasi.

Keberadaan institusi ekonomi dan seni budaya lokal serta para pelaku ekonomi lokal tersebut, sejatinya merupakan potensi dan aset desa yang dapat dikembangkan dan dikelola sebagai suatu kekuatan ekonomi lokal yang memiliki keunggulan komparatif sebagai desa pendukung kawasan wisata Waduk Darma.

2.1.5 Tata Kelola Ekonomi Lokal

Berdasarkan peta masalah, aset dan potensi yang telah dipaparkan di atas, penting untuk mengkaitkan peta masalah dan aset tersebut dengan tata kelola ekonomi lokal yang ada di Desa Cageur. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi tata kelola ekonomi Desa Cageur saat ini relatif masih belum memiliki konsep dan arah kebijakan yang jelas. Kebijakan makro dalam bentuk RPJM Desa belum dioperasionalisasikan dalam bentuk *bussines model* dan *bussines plan* yang tertuang dalam sebuah konsep tertulis.

Tata kelola ekonomi desa Cageur, masih berjalan sebagaimana adanya (*business as usual*) secara tradisional. Pelembagaan institusi ekonomi lokal terutama yang terkait

dengan pengembangan ekonomi desa, seperti BUM Desa dan Pokdarwis relatif baru terbentuk dan belum mampu menjadi daya ungkit perekonomian desa.

Kelompok-kelompok ekonomi lokal dan pelaku usaha kecil yang ada, seperti KWT, kelompok tani, dan pelaku usaha olahan pertanian relatif belum tersentuh dari aspek peningkatan kapasitasnya baik dalam hal produksi, manajemen hingga pemasaran produk. Padahal sejatinya, proses pengembangan ekonomi lokal tersebut merupakan suatu bagian terintegrasi dalam proses pembangunan desa yang melakukan proses pelembagaan institusi ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat selaku pelaku usaha, penciptaan peluang-peluang ekonomi baik berupa produk maupun jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya lokal yang ada serta dilakukan secara kolaboratif antara pihak pemerintah kabupaten, desa, dan juga masyarakat. Selain itu, PEL dapat juga diartikan sebagai suatu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi baik karena faktor kesejarahan, budaya, adat istiadat, dan lain lain. Termasuk di dalamnya kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun aset-aset lainnya (Munir, 2007).

2.2. Desa Sakerta Timur

Dalam upaya mengakselerasi pembangunan daerah berbasis desa, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah membuat Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2019 tentang Desa Pinunjul yang secara substansi merupakan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada keunggulan (*pinunjul*) karakteristik lokal dan menjadi dasar hukum bagi sinergitas perencanaan dan implementasi pembangunan berbasis desa. Adapun sasaran dari pembentukan desa *pinunjul* adalah desa-desa yang mempunyai keunggulan lokal baik berupa potensi atau kegiatan yang telah eksis di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan utama ekonomi lokal (Perbup. No. 1/2019). Desa-desa *pinunjul* tersebut dikategorisasi dalam 11 bidang, antara lain: bidang wisata, agro, pendidikan, UKM, Industri, budaya, dll. Dua puluh lima (25) dari 100 desa *pinunjul* yang diprioritaskan untuk dibangun selama lima tahun merupakan desa *pinunjul* di bidang wisata dengan 2 dari 25 desa berada di kawasan waduk Darma.

Gambar 8. Kantor Desa Sakerta Timur



Pada Desember 2019, IRE melakukan *assessment* terhadap enam desa yang menjadi sasaran program Desa *pinunjul*, di antaranya: Desa Jagara, Desa Darma, Desa Cipasung, Desa Sakerta Timur, dan Desa Gunung Sirah yang berada di Kecamatan Darma dan Desa Kertayuga yang berada di Kecamatan Nusa Herang. Desa Jagara, Desa Darma, Desa Cipasung, dan Desa Sakerta Timur. Berdasarkan hasil *assessment* semua desa relatif belum memiliki visi dan kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang jelas, kecuali Desa Cipasung yang relatif sudah memiliki visi dan arah pengembangan ekonomi lokal yang jelas, yaitu menjadi desa wisata (IRE, 2019).

Pada November 2020, IRE kembali melakukan *assessment* terhadap dua desa di Kawasan Darma, yakni Desa Sakerta Timur dan Desa Cageur. Desa Sakerta Timur yang menjadi salah satu desa *pinunjul* wisata sendiri sudah merintis pengembangan wisata desa. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pendukung wisata dengan mengusung konsep wisata budaya. Salah satu *value* yang menjadi konsep desa wisata Sakerta Timur adalah konsep “Kampung Tumaritis”, sebuah peradaban masyarakat Sunda dengan mengedepankan nuansa harmoni kehidupan sosial, budaya, agama, dan alam.

Desa Sakerta Timur sendiri memiliki penduduk 2.358 jiwa dan tersebar di 13 RT dan 2 dusun, yakni Dusun Wage dan Dusun Pahing. Mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat memiliki lahan pertanian dengan luasan lahan kurang dari 1 hektar. Pengelolaan tanahnya pun dilakukan sendiri dengan sistem penanaman musiman. Beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas di antaranya padi, kopi, cengkih, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.

Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sakerta Timur

Petani	Pedagang	Pns	Buruh
268	130	31	126

Sumber data: Pemerintah Desa Sakerta Timur, 2020

Pemanfaatan tanah dan lahan di Desa Sakerta Timur sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian basah berupa persawahan dan sebagian kecil yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan air tawar (kolam). Sisanya adalah tanah kering dimanfaatkan lahan penanaman palawija dan perkebunan, serta bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selain berpenghidupan sebagai petani, di Desa Sakerta Timur juga terdapat lahan milik perhutani yang dimanfaatkan untuk menanam kopi dan umbi-umbian oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat Sakterta Timur juga memiliki matapencaharian pendukung lainnya yaitu sebagi peternak. Biasanya beternak hewan menjadi salah satu upaya “investasi” jangka panjang bagi masyarakat. Sementara itu tingkat pendidikan masyarakat Desa Sakerta Timur adalah sebanyak 208 orang pendidikan prasekolah, 242 Sekolah Dasar (SD), 120 orang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 84 orang Sekolah Menengah Atas (SMA), 5 orang D3, 32 orang S1 dan 2 orang S2 (RPJM Desa Sakerta Timur 2020-2025).

Tabel 5 Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau
1.600	450	15	6

Sumber data: Pemerintah Desa Sakerta Timur, 2020

Sementara itu untuk pegiat usaha lokal di desa mulai dari usaha pengolahan hasil bumi, ekonomi kreatif dan usaha perdagangannya lainnya di desa terdata sebanyak 111 usaha. Pemerintah desa baru saja melakukan pendataan pelaku usaha lokal, meskipun begitu data-data tersebut masih kurang menunjukkan realitas sesungguhnya mengenai aktivitas ekonomi lokal karena beberapa usaha pengolahan yang dicantumkan baru sebatas rencana usaha dan belum terlaksana.

2.2.1. Kondisi Sosial Ekonomi

Sektor ekonomi Desa Sakerta Timur didominasi oleh sektor pertanian dengan sistem pengelolaan masih sangat tradisional baik dari sisi pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian Desa Sakerta Timur untuk lahan basah (sawah) adalah unggulan padi dan palawija. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian adalah: (1) Struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian diluar sentra padi. (2) lahan sawah yang sempit dan sistem pengairan yang kurang baik sehingga berdampak adanya kekurangan air jika pada saat musim kemarau. Sedangkan untuk lahan kering (ladang) hasil bumi unggulan didominasi oleh tanaman umbi-umbian dan perkebunan. Di samping itu, masih banyak lahan yang belum termanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Gambar 9. Petani di Persawahan Desa Sakerta Timur



Berdasarkan hasil *assessment* di Desa Sakerta Timut, beberapa masalah sosial ekonomi yang menjadi temuan lapangan adalah sebagai berikut:

Pertama, kurangnya kesediaan dan ketersediaan SDM pemuda baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga peran pemuda dalam pengembangan ekonomi lokal ataupun pengembangan sosial budaya di desa masih belum optimal.

Kebanyakan pemuda di Desa Sakerta Timur yang sudah lulus sekolah menengah atas akan langsung bekerja ke kota sebagai buruh pabrik, merantau sebagai pedagang, dan sebagiannya lagi berkuliah di kota lain. Di dalam data SDM pemuda yang dihimpun oleh Karang Taruna misalnya, di tahun 2020 tercatat ada sebanyak 80 pemuda yang masuk ke dalam keanggotaan Karang Taruna, 50% nya bersekolah atau bekerja di luar desa, sisanya yang ada di desa didominasi oleh anak-anak usia SMA yang secara kapasitas dan pengalaman juga belum mampu mengorgansir diri. Ditambah lagi pembinaan dan pendampingan kader muda di desa belum optimal sehingga keberadaan karang taruna masih sebatas menjadi “*event organizer*” dalam acara-acara desa (Wawancara personal, Angga, 24 November 2020).

Problem SDM sendiri memang diakui kepala desa menjadi hambatan tersulit yang dihadapi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, terutama kaitannya dalam hal pengembangan wisata di desa. Padahal infrastruktur pendukung wisata dan fasilitas yang dimiliki desa bisa dibilang sudah cukup kuat untuk dikelola dan dioptimalkan. Namun demikian, kebijakan tata kelola yang masih otoriter dan minimnya pelibatan SDM yang berkualitas semakin menghambat pengembangan wisata desa di Sakerta Timur. Ketiadaan proses kaderisasi dan minimnya akselerasi pemdes dalam membina dan memfasilitasi pemuda di desa pun menjadi hal yang harus dievaluasi. Meski demikian, hal ini justru menjadi peluang untuk membangun jejaring ke luar dengan memanfaatkan SDM pemuda yang banyak bersekolah dan bekerja di luar. Di dalam dokumen RPJM Desa disebutkan ada sekitar 5 orang SDM desa yang merupakan lulusan D3, 32 SDM desa yang merupakan lulusan S1 dan dua SDM lulusan S2.

Kedua, lemahnya institusi ekonomi lokal di desa. BUM Desa sudah berdiri sejak 2017 namun belum mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal di desa. BUM Desa sudah berdiri sejak 2017 dan sudah diberikan penyertaan modal, namun BUM Desa belum mampu mengembangkan usaha di desa. Bisnis atau usaha yang sudah dijalankan tidak terintegrasi dengan potensi lokal yang ada. Usaha diawali dengan jual beli minyak, kemudian usaha jual beli baju/fashion. Kedua usaha tersebut tidak berjalan dengan baik karena lemah secara konsep dan pengembangan. Hal tersebut dikarenakan lemahnya SDM pengelola BUM Desa, *roadmap* usaha yang dibuat tidak partisipatif sehingga hanya dipahami oleh kepala desa dan kurangnya pendampingan terhadap pengelolaan dan pengembangan ekonomi di desa.

Sadar akan kemandekan institusi ekonomi lokal yang ada di desa, baik itu BUM Desa maupun Pokdarwis, kepala desa membuat kebijakan revitaliasi lembaga lokal, termasuk dengan perombakan struktur organisasi. Kebijakan tersebut memang membuka ruang lebih strategis bagi keterlibatan anak muda di desa dalam pengembangan ekonomi lokal. Sebagai contoh, untuk pengelolaan BUM Desa, kepala desa sudah mengajak sejumlah pemuda untuk berdiskusi dan merencanakan usaha keberlanjutan bagi BUM Desa. Bahkan penunjukan direktur BUM Desa pun dilakukan oleh kepala desa berdasarkan kepercayaan secara personal pada salah seorang pemuda yang baru saja pulang bekerja

dari kota. Namun kendalanya, kapasitas dan kualitas SDM yang dipilih tersebut juga belum cukup menjadi jaminan bahwa BUM Desa yang telah mati suri dapat bangkit merintis kiprahnya sebagai gerakan ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, diperlukan adanya pembinaan dan pendampingan SDM baik dalam pengelolaan BUM Desa maupun dalam pengembangan bisnis dan usahanya. Kepala desa pun harus mampu melakukan intropeksi pada leadershipnya agar tidak “menyetir” dan “mendikte” secara otoriter dan dominan. Di tengah keterbatasan SDM pemuda di desa, pemdes telah menempatkan beberapa nama pemuda yang rencananya akan didaulat untuk menjadi pengelola BUM Desa. Dalam RKP Desa 2021 pun penyertaan modal untuk BUM Desa telah dicantumkan dengan nominal Rp. 50.000.000-Rp.75.000.000. Salah satu arah pengembangan usahanya yang telah disampaikan pemdes maupun calon pengelola BUM Desa adalah usaha pengolahan kopi lokal dan kedai kopi (Wawancara personal, kepala desa, KT, dan Pokdarwis, 2020).

Ketiga, minimnya dukungan usaha bagi kelompok perempuan di desa, sehingga masyarakat terjerat hutang dengan lembaga keuangan non perbankan. Meski sebagian besar masyarakat desa ini bekerja sebagai petani, namun penghidupan mereka juga ditopang oleh usaha lain untuk mencukupi kehidupannya, seperti berdagang. Kegiatan ini banyak digeluti oleh kaum perempuan dan kaum ibu di desa. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya permodalan, baik permodalan untuk memulai usaha dagang atau pun memulai menanam di sawah atau kebun. Sebagian besar usaha rumahan adalah usaha kecil yang dikelola oleh kaum perempuan, di antaranya adalah pengolahan hasil bumi seperti pembuatan keripik, pembuatan kue tradisional, atau pembuatan panganan lainnya. Seringkali mereka harus berhutang untuk dapat kembali memulai usaha, hanya sebagian kecil saja yang mampu melakukan produksi secara rutin dan dijual ke pasaran, sebagian besarnya masih mengandalkan sistem “pesanan” dan baru bisa berproduksi ketika ada permintaan (Wawancara personal pelaku usaha ekonomi desa, 2020).

Keempat, kuatnya dominasi kepala desa dan elit desa dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata. Hal ini terkonfirmasi dengan pengakuan masyarakat. Rata-rata kaum perempuan jarang dilibatkan atau bahkan tidak pernah merasa diberikan ruang untuk ikut dalam forum-forum musyawarah dusun dan desa. Dalam hal pengembangan wisata di desa misalnya, mereka bahkan mengaku tidak memahami dan tidak mengetahui program dan konsep seperti apa yang dikembangkan oleh desa. Selain itu, kedua kepala dusun di Desa Sakerta Timur juga mengakui bahwa konsep pengembangan desa wisata merupakan ide dari kepala desa yang pada prosesnya kurang partisipatif. Sosialisasi sudah dilakukan namun baru pada forum-forum formal yang belum menyertakan keterlibatan masyarakat secara inklusif. Di samping itu, akses informasi dan ruang bicara masih perlu dibuka untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat luas (Wawancara personal perangkat desa dan perempuan desa, 2020).

Kelima, sektor pertanian merupakan sektor primer dan dominan namun masih minim inovasi dan pendampingan terhadap kelompok tani. Sektor pertanian di Desa Sakerta Timur merupakan sektor yang paling banyak digeluti masyarakat. Namun demikian, justru sektor ini kurang mendapatkan perhatian dan pendampingan dari pemangku kepentingan terkait sehingga menyebabkan sektor pertanian belum bisa berkembang dan miskin inovasi. Sejumlah tantangan yang dihadapi di sektor pertanian antara lain sebagai berikut: (1) kelompok tani masih mengeluhkan masalah kualitas hasil panen dan produktivitas hasil panen. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang sulit diprediksi sehingga berpengaruh pada tanaman dan kurangnya pemahaman petani untuk meningkatkan strategi yang mampu mendorong hasil panen baik secara kuantitas maupun kualitas. (2) hasil panen dari petani baik itu padi, kopi, cengkih, sayuran, ataupun umbi-umbian masih dipasarkan secara tradisional kepada tengkulak dengan harga jual yang rendah. Kelompok tani di desa belum mampu melakukan penambahan nilai produksi melalui proses pengolahan, baik secara mandiri maupun secara kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Di masa pandemi bahkan harga jual produk pertanian mengalami penurunan. (3) Terbatasnya irigasi dan kurangnya pengairan di desa juga menjadi salah satu kendala yang dialami oleh petani petani. (4) ketiadaan lembaga ekonomi lokal yang mendukung permodalan petani sehingga petani masih mengalami kesulitan dalam permodalan dan seringkali harus berhutang untuk memulai penanaman dan pemupukan (FGD dengan Kelompok Tani, 2020).

Kelima, di masa pandemi beban dan kerentanan perempuan di desa semakin bertambah. Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kepala keluarga yang bekerja di kota harus dirumahkan. Hal ini membuat mereka harus kembali ke desa dan mencari pekerjaan lain, mulai dari bercocok tanam hingga kerja serabutan. Namun, pekerjaan serabutan seringkali belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehingga pada akhirnya perempuan yang harus mengambil peran sebagai penopang dan pencari nafkah. Di Desa Sakerta Timur sendiri beberapa perempuan harus pergi merantau ke Jakarta di masa pandemi untuk bisa menghidupi keluarga. Akibatnya, anak-anak mereka pun tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai di rumah.

Selain perempuan yang pergi merantau, beban dan kerentanan perempuan di desa ini adalah beban mendampingi anak selama belajar jarak jauh. Di samping harus meluangkan waktu dalam mendampingi anak dalam belajar, beberapa keluarga yang taraf ekonominya lemah dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas internet dan telepon pintar terpaksa harus berhutang demi membeli alat penunjang pembelajaran daring tersebut berikut paket datanya. Mirisnya hutang tersebut diajukan kepada lembaga keuangan non bank yang memiliki sistem renten dengan bunga yang cukup tinggi. Kondisi ini menambah beban hutang perempuan di desa yang sudah cukup memberatkan. Perempuan yang memiliki usaha dagang dan usaha pengolahan makanan juga turut merasakan dampak. Mereka yang biasanya berjualan di sekolah atau keliling menjual makanan kini tidak bisa lagi rutin berjualan karena penutupan sekolah dan menurunnya daya beli. Hal ini kemudian berdampak pada kondisi ekonomi keluarga (wawancara personal Bu Entin, 2020).

2.2.2. Tata Kelola Pemerintah Desa Bidang Ekonomi

Visi dan kebijakan pengembangan ekonomi Desa Sakerta Timur berdasarkan dokumen RPJMDesa 2020-2025 adalah **Menggali potensi yang ada serta mengembangkan Sakerta Timur menjadi Desa Wisata yang Pinunjul**. Desa ini sudah melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung wisata di desa, seperti pembangunan kolam pemancingan, sirkuit, gazebo, kios-kios usaha sekitar area, bumi perkemahan dan panggung seni budaya yang terkonsentrasi di kawasan “Kampung Tumaritis”. Namun, pengembangan wisata desa yang telah dirintis 2-3 terakhir ini belum mampu menunjukkan perubahan dan memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi desa maupun masyarakat. Pengembangan wisata yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur juga tidak selaras dengan konsep dan nilai (*value*) wisata desa budaya “tumaritis”.

Meskipun arah pengembangan wisata desanya belum memiliki konsep yang kuat dan jelas, beberapa aktivitas wisata di desa sudah ada yang berjalan. Di antara aktivitas wisata ini adalah bumi perkemahan, pemancingan dan sirkuit.

Hanya pemancingan dan perkemahan saja yang dikelola oleh desa melalui pokdarwis, sedangkan pemancingan dikelola oleh warga dengan sistem sewa. PADes yang diterima desa dari usaha ini sebesar Rp 17 juta rupiah, belum sebanding dengan besarnya biaya pembangunan infrastruktur wisata yang telah dilakukan. Bahkan sekarang, keberadaan sirkuit sendiri sudah terbengkalai seiring dengan dampak pandemi pada sektor wisata desa.

Lemahnya konsep dan arah pengembangan wisata ini juga dibuktikan dengan beberapa temuan lain, antara lain:

- Pembuatan kolam renang modern dan sirkuit jelas tidak memiliki korelasi dengan konsep kampung wisata budaya “Tumaritis” yang diusung.
- Area pemancingan di kampung tumaritis juga bahkan tidak terkelola oleh desa melainkan disewakan kepada masyarakat. Demikian pula dengan kios-kios unik yang mulai terbengkalai.
- Panggung budaya pun hanya digunakan ketika ada event-event tertentu saja dan belum mampu menunjang pengembangan dan pelestarian budaya lokal.

Gambar 10. Potensi Wisata Desa Sakerta Timur



Peluang untuk memperbaiki tata kelola ekonomi lokal mulai nampak melalui komitmen Pemdes Sakerta Timur dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2021 yang berorientasi pada pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi lokal. Menurut Kepala Desa, ke depan pemdes akan memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat, terutama melalui penguatan institusi lokal dan dukungan bagi para pelaku usaha lokal di desa. Dalam dokumen RKP Desa 2021 terdapat beberapa item program pemberdayaan, seperti pelatihan kelompok seni masarakat, pelatihan kompepar, pengembangan desa wisata, dan penyertaan modal untuk BUM Desa sebesar Rp. 70.000.000.

Langkah awal yang telah dan sudah mulai ditempuh desa dalam pengembangan ekonomi desa di tahun 2021 di antaranya yaitu: (1) pendataan pelaku usaha lokal di desa untuk kemudian dihimpun dalam klaster-klaster atau kelompok usaha dan (2) rencana kepala desa untuk mengumpulkan kelompok-kelompok tersebut guna menyerap aspirasi, dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Langkah ini nantinya selaras dengan arah kebijakan dan tujuan desa dalam RPJM Desa Tahun 2020-2025, yakni memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa yang tertera dalam dokumen RPJMDesa Sakerta Timur 2020-2025 juga sebenarnya sudah mulai mengarah pada orientasi pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, namun belum secara spesifik menyertakan konsep pengembangan ekonomi lokal, arah pengembangan BUM Desa di dalam RPJMDes juga belum menjadi fokus khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa tujuan yang disebutkan tersebut diantaranya adalah (1) penggalian dan pengembangan potensi sumber daya lokal terutama pada sektor produktif seperti: sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga, pariwisata, jasa dan UMKM. (2) Pengembangan pusat-pusat ekonomi masyarakat dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. (3) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berdampak pada perekonomian masyarakat. (4) Peningkatan daya dukung terhadap terhadap kelompok-kelompok usaha, baik melalui pelatihan, permodalan dan pengembangan lembaga ekonomi lokal (koperasi).

Selain itu, proyeksi program kepala desa ke depannya dalam pengembangan ekonomi desa adalah memperkuat peran BUM Desa sebagai sentra pengembangan ekonomi dan menjalin kemitraan antara BUM Desa dengan pokdarwis dan karang taruna dalam mengembangkan usaha berbasis aset dan potensi lokal. Meskipun dari segi perencanaan makro sudah memiliki arah pengembangan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal, namun hal tersebut tentu tidak akan terjadi bila pada prosesnya tetap didominasi oleh elit desa saja, sehingga ruang-ruang demokrasi lokal yang selama dan ruang partisipasi yang selama ini tertutup harus dibangun secara inklusif dan transparan.

2.2.3. Peta Aset dan Potensi Ekonomi Desa

Berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, Desa Sakerta Timur memiliki aset dan potensi ekonomi lokal yang cukup berlimpah dan cukup memadai. Dari segi infrastruktur ekonomi misalnya, Desa Sakerta Timur sudah membangun sarana dan prasarana pendukung wisata di Kampung Tumaritis seperti gedung seni budaya, gazebo desa, kolam, bumi perkemahan, dan pemancingan. Namun sayangnya aset pendukung wisata tersebut belum terkelola dengan baik dan malah terbengkalai. Hal ini dikarenakan (1) lemahnya pengelolaan yang dilakukan oleh pemdes maupun lembaga ekonomi lokal desa. (2) lemahnya kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap konsep pengembangan wisata yang diusung oleh desa. (3) pemanfaatan potensi lokal yang mampu menunjang pengembangan wisata belum dioptimalkan. (4) konsep pengembangan wisata lemah dan belum terarah.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh para pelaku olahan produk lokal adalah: (1) kurangnya permodalan, (2) kurangnya pendampingan dalam peningkatan kualitas produk, pengemasan dan pemasaran, (3) belum ada pengorganisasian dan pembinaan dari desa.

Hasil bumi Desa Sakerta Timur juga cukup melimpah, diantaranya (1) Padi, (2) Kopi, (3) Cengkih, (4) umbi-umbian (5) Sayur-sayuran, (6) sari pohon nira sebagai bahan baku gual aren. Namun, keberlimpahan dari hasil bumi tersebut belum diimbangi oleh pengolahan hasil yang optimal.

Selain itu, desa ini juga memiliki lanskap persawahan dan ladang yang memiliki daya tarik tersendiri. Selain itu, banyaknya kolam ikan yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi potensi tersendiri namun kini belum termanfaatkan secara optimal.



Gambar 11. Arena sirkuit yang terbengkalai



Gambar 12. Kolam renang desa yang tidak terawat



Gambar 13. Salah satu kolam ikan milik warga



Gambar 14. Lanskap persawahan di Desa Sakerta Timur

Hasil bumi yang berlimpah seperti kopi dan umbi-umbian menjadi potensi desa yang perlu dikembangkan. Beberapa pelaku ekonomi lokal telah mengolah produk lokal, seperti gula aren, kripik, sale pisang, dan aneka panganan tradisional. Meski demikian hingga kini belum ada upaya mengorganisasikan usaha-usaha tersebut agar dapat dioptimalkan dari sisi produksi dan pemasaran.

Temuan menarik lainnya adalah "*basic skill*" perempuan-perempuan di desa yang mampu melakukan pengolahan pangan lokal. Selain pembuatan kripik, kelompok perempuan juga mampu mengolah aneka makanan dari umbi-umbian dan gula aren. Problem yang dihadapi mereka adalah pemasaran yang terbatas di lingkungan desa. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan berkurangnya produksi dan pendapatan kelompok ini.

Potensi lain yang dimiliki desa adalah keberadaan *homestay* masyarakat dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Secara budaya, masyarakat Sakerta Timur cukup terbuka dan ramah, atau dalam bahasa sunda dikenal dengan kata "*someah*". Keramahan inilah yang membuat tamu atau pendatang yang tinggal di *homestay* mendapatkan *hospitality* yang berkesan dan menyenangkan. Namun demikian, ada beberapa catatan penting terkait pengelolaan *homestay* warga, yakni: (1) perlunya penguatan pengelolaan *hospitality* yang khas/memiliki konsep baik dalam penataan dan pelayanan (2) sistem kemitraan yang transparan dari desa ke pemilik *homestay*, dan (3) kurangnya tingkat okupansi *homestay-homestay* warga karena sepi kunjungan wisatawan.



Gambar 15. Produk Sale Pisang



Gambar 16. Proses pengemasan sale pisang melibatkan ibu-ibu sekitar dusun



Gambar 17. Produk gula aren



Gambar 18 Produk gula aren basah



Gambar 19 Keripik singkong produksi ibu Wiwin dari Dusun Wage



Gambar 20. Becak singkong



Gambar 21. Homestay Bu Entin



Gambar 22. View depan homestay

Desa Sakerta Timur memiliki keberlimpahan aset fisik, sosial dan budaya. Aset-aset tersebut merupakan modal penting bagi pengembangan ekonomi lokal di desa, terutama untuk pengembangan wisata. Di dalam APB Desa 2020 tercatat pendapatan asli desa sebesar Rp. 1,333,878,173.

Berikut ini adalah infrastruktur pendukung wisata yang dimiliki oleh Desa Sakerta Timur

a. Sumber Daya Fisik

Sarana Prasarana	Jumlah
Gedung Kesenian	1
Gajebo	2
Lapang Bola voly	3
Kolam Pemancingan	1
Bumi perkemahan	1
Saung Tani	1
Gedung Bumdes	1
MCK	4
Pos kamling	13
Kolam renang anak	1
Kios desa	9
Gpura Desa	2
Sumber mata air	3
Pekebunan	125 Hektar
Ladang	25 Hektar
Sawah	56 Hektar

Sumber: RPJMDesa Sakerta Timur 2020-2025

b. Sumber Daya Ekonomi

NO	JENIS	JUMLAH	PEMANFAATAN SEKARANG
1	Warung	30 Buah	Didominaasi oleh warung klontong biasa
2	Bengkel Motor	1 Buah	Kepemilikan warga pribadi
3	Penggilingan Tepung	3 Buah	Kepemilikan warga pribadi
5	Home Industri	5 Buah	Kepemilikan warga pribadi
7	Kolam Ikan	100 Buah	Belum termanfaatkan secara produktif baik untuk budidaya ataupun atraksi wisata desa
8	Peternak Domba	120 Orang	Kepemilikan warga pribadi
9	Peternak Ayam	11 Orang	Kepemilikan warga pribadi
10	Peternak Sapi	25 Orang	Kepemilikan warga pribadi

c. Pelaku Usaha Lokal Di Desa Berbasis Produk Lokal (SDM)

No	Jenis Usaha	Pengelolaan Usaha	Kendala	Kebutuhan
1	Pengolahan gula aren	Dikerjakan secara individu oleh 22 pengolah gula aren. Pemasaran sudah dilakukan hingga keluar Kuningan secara mandiri	Bahan baku tidak selalu mudah didapatkan sehingga ketika ada pesanan terkadang tidak bisa terpenuhi semua	Inovasi produk pengolahan berbahan dasar gula aren
2	Pembuatan keripik (singkong, talas dll)	Ada 2 pengolah keripik yang sudah rutin membuat dan memasarkan produknya hingga ke warung-warung, pasar hingga distributor keripik yaitu Ibu Wiwin dan Ibu Een, namun ada juga ibu-ibu yang membuat keripik berdasar pesanan atau by order.	Permodalan masih terkendala, sulit produksi dalam jumlah banyak Pengemasan (<i>packaging</i>) dan branding belum ada Akses dan jaringan pasar masih terbatas	Dukungan permodalan, pelatihan inobvasi pengolahan, pelatihan pengemasan dan branding, dukungan pemasaran oleh BUM Desa

3	Pembuatan anyaman bambu	Ada seorang pengrajin anyaman bambu, yaitu pak eman. Biasanya membuat pesanan anyaman berupa "boboko" dan dijual di warung atau pasar. Setahun terakhir, tidak lagi berproduksi karena problem penjualan.	Lemahnya regenerasi pengrajin di desa Lemahnya inovasi pembuatan anyaman Branding/pengemasan dan pemasaran	Pelatihan inovasi produk <i>Branding</i> Dukungan pemasaran oleh BUM Desa
4	Sale pisang	Diolah oleh Bu Wiwi bersama karyawannya yang merupakan ibu-ibu di desa, produksinya bisa ratusan bungkus setiap 1-2 hari sekali, pengiriman sudah sampai keluar daerah, dan dipasarkan di tempat oleh-oleh	Bahan baku pisang sale dari luar desa <i>Branding</i> lokalnya belum kuat	Dukungan pemasaran oleh BUM Desa, penguatan branding lokal, penyediaan bahan baku lokal
5	Pembuatan rengginang singkong dan olahan kue tradisional	Pemasaran masih sebatas pesanan dan pengelolaan usaha masih berjalan masing-masing	Permodalan, pengemasan, akses pasar	Pengorganisirna kelompok pengolahan pangan kreatif, dukungan permodalan, dukungan pengemasan/ <i>branding</i> , dukungan pemasaran oleh BUM Desa

6	Pengolahan kopi	Di Desa Saktim belum ada yang secara fokus melakukan pengolahan kopi, adapun beberapa anak muda mulai mencoba memasarkan kopi, itupun masih dalam bentuk mentah	Belum ada pengorganisasian usaha pengolahan kopi, Lemahnya kapasitas SDM Belum ada dukungan alat pengolahan	Pengorganisasian petani kopi dalam pengolahan, peningkatan kapasitas, pendampingan dalam pengemasan dan pemasaran
---	------------------------	---	---	---

d. Sumber Daya Sosial Dan Budaya

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Kebutuhan
1	Arisan perelek	12 kelompok (RT)	Setiap RT di Saktim memiliki arisan perelak atau arisan beras, dikumpulkan setiap sebulan sekali, nantinya dari beras itu diuangkan dan uangnya dikumpulkan utk jadi tabungan RT yang bisa dipinjam oleh warga ketika ada hajatan sakit dll, tanpa bunga. Atau dijadikan modal gorong royong pembuatan sarana kolektif yang tidak bisa disupport desa. Dana ini hanya bisa dipinjam oleh kelompok dan tidak bisa dipinjam secara fleksibel sehingga untuk warga yang butuh modal usaha tetap harus meminjam ke PNM	Jika diorganisir untuk pengembangan dan penguatan ekonomi lokal akan menjadi modal kolektif yang cukup kuat dengan pengelolaan yang transparan. Ini juga ampuh membantu kelompok perempuan keluar dari jerat hutang

2	Seni babarit, seni gembyung, jaipong, calung dll		<p>Tradisi ulangtahun desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali menggabungkan beragam atraksi pertunjukan seni dan budaya dan pengolahan hasil bumi.</p> <p>Secara kelompok sebenarnya keberadaan para pegiat seni di desa belum terorganisir dengan baik, dan secara kapasitas juga belum terlalu memadai. Adanya gedung seni dan alat musik juga belum optimal dimanfaatkan, mayoritas pegiat seninya adalah orangtua.</p>	Perlu pengorganisasian kelompok seni dan penguatan kapasitas, serta kaderisasi pemuda.
3	Gotong royong		Tradisi gotong-royong di desa Sakerta Timur masih cukup kental terutama saat ada acara-acara kolektif seperti pembangunan rumah atau pernikahan, masyarakat akan saling membantu dan memberikan dukungan baik dalam bentuk patungan, tenaga, maupun olahan panganan.	Tradisi gorong royong masyarakat bisa menjadi satu value kuat dalam edukasi atraksi wisata budaya masyarakat
4	Karang Taruna		Kurangnya peran KT dalam pengembangan wisata desa.	Tahun 2021 desa akan melakukan perombakan kepengurusan dan pelibatan KT dalam pengelolaan wisata dan usaha bersama BUM Desa.

5	<i>Homestay</i>		<p>Saat ini homestay yang ada baru dimanfaatkan jika ada tamu ke desa, tamu-tamu yg datang pun didominasi oleh tamu dari STP Trisakti yang memang rutin datang ke desa setahun sekali untuk mengadakan program pelatihan dan dari IRE yang mengadakan riset.</p> <p>Kondisi masyarakat yang terbuka dan ramah menjadi poin plus karna memberikan kesan baik pada tamu yang datang.</p>	<p>Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan homestay</p>
6	Makam Mbah Kuwu Jago		<p>Makam Mbah Kuwu seringkali didatangi oleh orang luar untuk ziarah namun belum secara spesifik dikelola menjadi tempat khusus/ situs makam sejarah.</p>	<p>Potensi situs sejarah dan budaya yang jika digali sebetulnya memiliki keterkaitan dengan sejarah desa lain dan bisa menjadi satu value edukasi sejarah desa.</p>

2.2.4. Peta Lembaga Ekonomi Lokal

Berdasarkan hasil temuan lapangan IRE, lembaga ekonomi di Sakerta Timur antara lain: BUM Desa, Pokdarwis, Kelompok Tani, dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kondisi dan permasalahan masing-masing lembaga ekonomi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini.

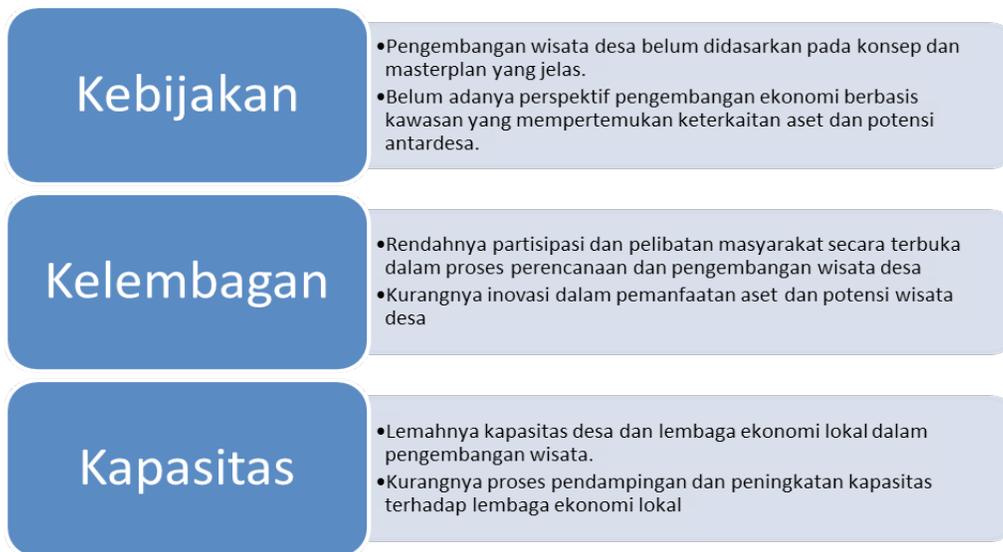
No	Institusi ekonomi	Kondisi	Aktivitas ekonomi	Produk usaha	Pemasaran	Rencana Desa
1	BUM Desa	Sudah berdiri sejak 2017, sudah ada penyertaan modal untuk BUM Desa sebanyak 50 juta namun sejak berdiri di taun 2017 hingga sekarang BUM Desa belum memperlihatkan perkembangannya, bisnis atau usaha yang dijalankan tidak terintegrasi dengan potensi lokal, usaha diawali dengan jual beli minyak dll, kemudian usaha jual beli baju/fashion. Kedua usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak memberikan manfaat dan kkeuntungan bagi PADes. BUM Desa pun dibekukan oleh kepala desa dan tidak berjalan.	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Akan dilakukan pelantikan dengan kepengurusan yang baru dengan pelibatan anak-anak muda. Kuwu menganggarkan penyertaan modal 70 juta bagi BUM Desa. BUM Desa diproyeksikan akan menjadi koordnator pengelola semua jenis usaha didesa mulai dari perdagangan (UMKM) hingga wisata dengan melibatkan institusi lokal lainnya sebagai mitra pengelola, yaitu Karang taruna dan Pokdarwis

2	Pokdarwis	Selama berdiri kompepar tidak memiliki kewenangan atau pembagian peran yang jelas dari desa, SDM Kompepar juga didominasi oleh orang tua dan minim pemuda, selama proses pengembangan desa wisata kompepar terlibat dalam pengelolaan buper,sirkuit dll	Pengelolaan wisata desa	wisata		Pelantikan kepengurusan baru dengan integrasi kemitraan bersama bum Desa untuk pengelolaan usaha di desa
3	Kelompok Tani	Ada 8 kelompok tani di Saktim, salah satu kelompok tani induknya adalah kelompok tani Karya Makmur terdiri sri 15 orang petani rata-rata lanjut usia, sudah terbentuk sejak 1980-an dan memiliki usaha jual beli pupuk serta obat-obatan tani. Belum ada usaha pengolahan yang lebih lanjut karena kendala permodalan dan keterbatasan kapasitas. Kelompok tani membutuhkan peningkatan kapasitas baik dalam hal pengembangan komoditas alternatif, pola penanaman dan pengolahan hasil bumi terutama kopi.	Penjualan hasil Pertanian, obat penjualan obat dan pupuk tani	Padi, kopi, cengkih dll, obat-obatan tani dan pupuk	Melalui tengkulak	Desa baru memiliki rencana untuk perbaikan sistem irigasi pertanian dan belum secara spesifik mengarah pada peningkatan kapasitas atau pendampingan kelompok tani.

4	KWT	<p>KWT yang aktif adalah KWT di Dusun Wage, terdiri dari 14 anggota yang mengelola kebun bersama, menanam berbagai jenis sayura hasil panennya sudah mulai dipasarkan dan dikordinir oleh bu Yani kelompok kwt yang merupakan istri dari kepala dusun wage. KWT kegiatannya masih sebatas tanam, panen jual dan belum ada inovasi kegiatan pengolahan hasil. Kedepannya memerlukan peningkatan kapasitas terutama dalam pengolahan hasil panen dan perluasan jaringan kelompok, agar tidak hanya fokus di satu dusun</p>	Penjualan hasil pertanian	sayuran	Ke pasar	Belum adarencana khusus untuk pengembangan KWT oleh desa.
5	Perkumpulan seni	Hanya tampil jika ada hajatan di desa, secara kapasitas masih belum kuat dan belum terorganisir menjadi kelompok yang memiliki arah	Atraksi seni dan budaya	Atraksi seni dan budaya	Perkumpulan seni	Desa berencana akan memperkuat kapasitas kelompok seni terutama dikembangkan untuk atraksi wisata budaya

2.2.5. Tata Kelola Ekonomi Lokal

Berdasarkan temuan masalah dan potensi di atas, terdapat sejumlah pemetaan mengenai kondisi kekinian tata kelola ekonomi lokal sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:



Gambar 23. Bagan Kondisi Tata Kelola Ekonomi Desa Sakerta Timur

Problem di tiga level (kebijakan, kelembagaan, dan kapasitas) masih mewarnai praktik tata kelola ekonomi Desa Sakerta Timur. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan keputusan-keputusan publik terkait tata kelola ekonomi lokal. Studi IRE (2017) menunjukkan bahwa kinerja ekonomi lokal yang demokratis salah satunya ditandai dengan kuatnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keputusan-keputusan publik di desa dan dalam kelembagaan ekonomi lokal yang ada.

Selain itu, problem tata kelola ekonomi di Desa Sakerta Timur adalah belum adanya orientasi PEL yang berpihak pada kelompok rentan dan marjinal (inklusif). Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi kelompok ini baik dalam akses permodalan, pelibatan, maupun kemanfaatan lembaga ekonomi tersebut bagi masyarakat rentan dan marjinal. Hal ini juga nampak dari kurangnya pemahaman warga, khususnya perempuan mengenai agenda pengembangan wisata desa.

BAB 3

***BUSINESS MODEL* UNTUK PERENCANAAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

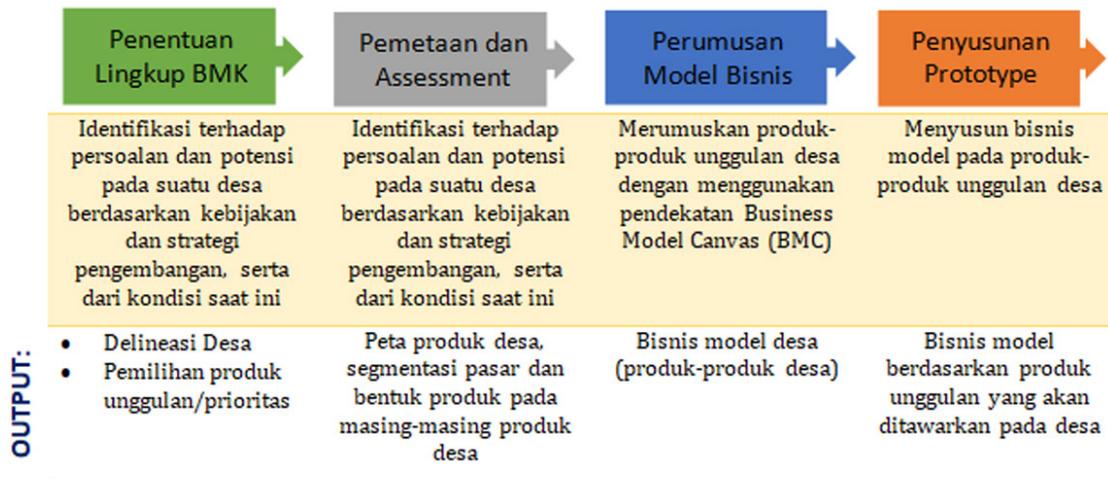
Rencana pengembangan ekonomi desa dalam suatu kawasan perdesaan harus sesuai dengan rencana pengembangan ekonomi kawasan perdesaan dimana suatu desa berada. Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur, Kecamatan Darma masuk dalam skema pengembangan kawasan Waduk Darma yang merupakan salah satu proyek pembangunan pariwisata Kabupaten Kuningan. Pemerintah Propinsi Jawa Barat bersama Kementerian PUPR telah menetapkan program revitalisasi Waduk Darma sebagai destinasi wisata bertaraf internasional. Pemda Kabupaten Kuningan juga telah berkomitmen untuk melakukan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan (PEKP) Waduk Darma. Desain PEKP tersebut membutuhkan perencanaan pengembangan ekonomi di level kawasan maupun pada level desa. Desa-desa di kawasan Waduk Darma harus bersinergi dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan agar dapat memanfaatkan peluang dari program revitalisasi Waduk Darma sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.

Desa-desa di kawasan Waduk Darma harus menyiapkan desain pengembangan ekonomi desa. Bab ini akan fokus membahas perencanaan usaha dalam desain pengembangan ekonomi desa dengan menggunakan Business Model Kanvas (BMK). Perencanaan usaha (*business plan*) yang akan dikembangkan oleh desa diawali dengan penentuan alternatif usaha-usaha (bisnis) yang potensial untuk dikembangkan oleh desa berdasarkan hasil kajian dan pemetaan persoalan, kebutuhan, aset, dan potensi yang ada di desa. Alternatif usaha agar dapat diimplementasikan perlu dituangkan dalam sebuah model bisnis.

Suatu perencanaan bisnis dikembangkan dari sebuah model bisnis. Model bisnis mengartikulasikan logika dan memberikan data dan bukti lain yang menunjukkan bagaimana bisnis menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Intinya, model bisnis adalah sebuah konsep bisnis, bukan finansial (Teece, 2010). Salah

satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan usaha secara ringkas, cepat, dan sederhana adalah dengan menggunakan *business model canvas* (BMC). Bisnis model adalah landasan bagaimana suatu organisasi merancang, mengantarkan, dan menangkap nilai dari produk/jasa yang dihasilkan (Osterwalder dan Pigneur, 2010).

Pada bab ini akan disajikan alternatif usaha yang potensial untuk dikembangkan dan rancangan bisnis model di masing-masing desa lokasi kajian. Tahapan penyusunan Bisnis Model Kanvas (BMK) pada pengembangan usaha desa adalah sebagai berikut:



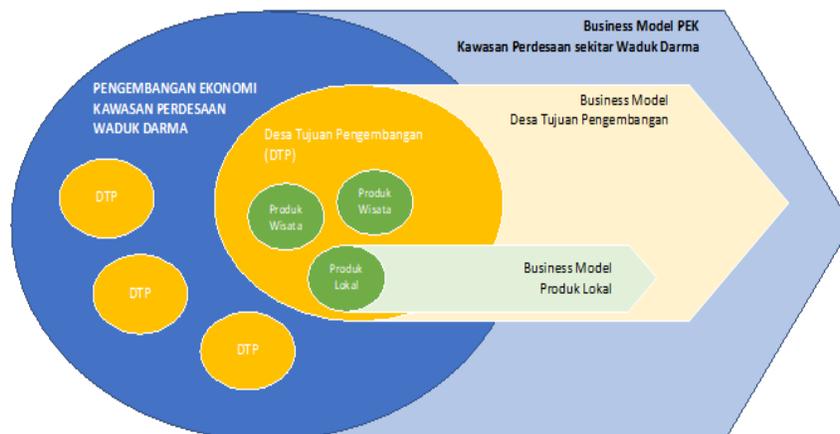
3.1. Penentuan Lingkup Penyusunan Bisnis Model

Terdapat 2 bentuk bisnis model, yaitu:

- Bisnis Model 1 desa tujuan pengembangan (beberapa produk unggulan).
- Bisnis Model 1 produk unggulan di desa tujuan pengembangan

Jika digambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 24. Lingkup Penyusunan Bisnis Model dalam Skema Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Waduk Darma



Berdasarkan Gambar 3.3 di atas maka dalam laporan ini akan ada 2 bisnis model desa tujuan pengembangan yaitu untuk Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur. Pada masing-masing desa akan dikembangkan bisnis model produk unggulan.

3.2. Perumusan Model Bisnis

Elemen Bisnis Model yang digunakan merupakan modifikasi *Business Model Canvas* dalam pengembangan usaha di desa berbasis aset dan potensi, yang terdiri dari:

Elemen Utama:

Elemen utama dalam perumusan bisnis model pengembangan usaha di desa berbasis aset dan potensi, sbb:

1. Segmen pelanggan (*Customer Segment*);
2. Proposisi Nilai (*Value Proposition*);
3. Jalur distribusi (*Channel*);
4. Hubungan Pelanggan (*Customer relationship*);
5. Arus Pendapatan (*Revenue Stream*);
6. Sumberdaya Utama (*Key Resources*);
7. Aktivitas Utama (*Key Activities*);
8. Kemitraan Utama (*Key Partnership*) dan
9. Struktur Biaya (*Cost Structure*).

Elemen Tambahan

Bisnis model dalam konteks pengembangan usaha di desa berbasis aset dan potensi membutuhkan elemen tambahan sbb:

1. Mekanisme Pembagian Peran
2. Strategi Pentahapan Kegiatan Rencana Implementasi
3. Skema Kerja Sama

Penerapan setiap elemen bisnis model sebagai berikut:

1. **Proposisi Nilai (*Value Proposition*)**

Pertanyaan kunci untuk menetapkan proposisi nilai dari produk unggulan desa yang akan ditawarkan oleh pelaku usaha di desa yaitu: (1) nilai tambah apa yang akan diberikan kepada konsumen? (2) kebutuhan konsumen seperti apa yang akan dilayani dan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen? (3) bagaimanakah bentuk produk yang akan ditawarkan kepada setiap segmen konsumen?

Merupakan tahap lanjutan dari penentuan segmen pelanggan dengan menganalisis peta nilai yaitu dengan mendeskripsikan proposisi nilai berdasarkan segmen

pelanggan yang menerima produk ke dalam bisnis model secara lebih rinci dan terstruktur.

2. ***Segmen Pelanggan (Customer Segment)***

Pertanyaan kunci untuk menetapkan segmen pelanggan (*customer*) yang akan disasar oleh pelaku usaha di desa yaitu: (1) untuk siapa pelaku usaha menciptakan nilai? dan (2) segmen pelanggan yang seperti apa yang paling penting untuk diberikan pelayanan?

3. ***Saluran Distribusi (Channels)***

Pertanyaan kunci untuk menentukan saluran distribusi dari produk unggulan desa yang akan ditawarkan oleh pelaku usaha di desa yaitu: (1) melalui saluran mana segmen pelanggan ingin dicapai? Bagaimana cara mencapainya? (2) bagaimana mengintegrasikan saluran tersebut? (3) bentuk saluran seperti apa yang dapat menghemat biaya (pengeluaran)? dan (4) bagaimana cara mengintegrasikan saluran dengan rutinitas pelanggan?

4. ***Hubungan Pelanggan (Customer Relationship)***

Pertanyaan kunci untuk menentukan hubungan pelanggan yang harus dibangun oleh pelaku usaha di desa yaitu: (1) jenis hubungan yang akan dibangun dan dipertahankan untuk masing masing segmen pelanggan? (2) apa saja hubungan dengan pelanggan yang telah dibangun? (3) berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun hubungan tersebut? (4) bagaimana hubungan pelanggan dapat terintegrasi dengan bisnis model dan melalui saluran mana?

5. ***Aliran Pendapatan (Revenue Streams)***

Pertanyaan kunci untuk menentukan aliran pendapatan yang akan diterima adalah (1) bentuk nilai jual seperti apa yang membuat pelanggan benar-benar bersedia membeli suatu produk? (2) berapa banyak setiap jenis arus pendapatan berkontribusi terhadap pendapatan secara keseluruhan? Langkah-langkah untuk menentukan aliran pendapatan dalam penyusunan bisnis model:

- Identifikasi cara untuk menghasilkan arus pendapatan pada masing masing produk.
- Melakukan analisis mekanisme penentuan harga terhadap produk yang ditawarkan.

6. ***Sumber Daya Utama (Key Resources)***

Pertanyaan kunci untuk menentukan sumber daya utama yang harus disediakan oleh pelaku usaha adalah apa saja sumber daya utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai jual pada produk yang ditawarkan.

7. *Aktivitas Utama (Key Activities)*

Pertanyaan kunci untuk menentukan aktivitas utama yang harus dijalankan oleh pelaku usaha di desa, yaitu apa sajakah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan preposisi nilai produk yang terpenting yang harus dikembangkan agar usaha dapat beroperasi dengan sukses?

8. *Mitra Utama (Key Partners)*

Pertanyaan kunci untuk menentukan mitra utama yang potensial untuk diajak bekerja sama oleh pelaku usaha di desa, yaitu (1) siapa saja mitra kerja yang dapat membuat model bisnis dapat bekerja? (2) siapa saja pemasok utama yang dapat membuat model bisnis dapat bekerja?

9. *Struktur Biaya (Cost Structure)*

Struktur biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Umumnya dapat dibagi atas 2 kategori, yaitu: (1) Biaya tetap, yang relatif tetap jumlahnya setiap bulan seperti biaya sewa toko, biaya karyawan, biaya keamanan dsb. dan (2) Biaya variabel yang nilainya berubah-ubah sesuai kebutuhan, seperti biaya marketing, komisi penjualan, listrik, telepon dsb.

Semua biaya yang timbul harus dikenali dan dicatat agar mudah mengontrol dan kedepannya bisa dilakukan efisiensi sesuai kebutuhan. Hal lainnya adalah kita bisa mengukur apakah usaha ini sebenarnya menguntungkan atau tidak, yaitu dengan membandingkan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan.

3.3. Pendekatan Pengembangan Wisata di Desa

Berdasarkan kajian kebutuhan, aset, dan potensi desa yang dilakukan di Desa Sakerta Timur dan Desa Cageur yang berada di Kecamatan Darma pemanfaatan aset dan potensi desa sebaiknya difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis pada pariwisata atau pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, pengembangan bisnis modelnya harus mempertimbangkan berbagai pendekatan pengembangan pariwisata di perdesaan. Pendekatan pengembangan wisata di wilayah perdesaan sebaiknya menggunakan pendekatan wisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Pengembangan Desa Wisata harus dilaksanakan dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan mempertemukan antara kebutuhan wisatawan dan pemilik wilayah dengan tetap melindungi dan meningkatkan peluang pengembangan yang akan datang. Hal ini berarti pengelolaan sumber daya yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan keindahan; tetap mempertahankan integritas budaya, proses ekologi, keberagaman biologi, dan sistem pendukung hidup” WTO, 1998:19.

Gambar 25. Pendekatan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan



Pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan harus didukung dengan konsep wisata berbasis komunitas (*Community Based Tourism – CBT*). CBT adalah wisata yang memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Pengelolaan dan pemilikannya dilakukan oleh dan untuk masyarakat (lokal), dengan tujuan memampukan pengunjung meningkatkan kepedulian dan belajar tentang komunitas dan gaya hidup masyarakat lokal (REST, 1997).

- Memahami, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan komunitas lokal pada kawasan wisata
- Mempromosikan kebanggaan komunitas
- Memastikan keberlanjutan lingkungan
- Mendorong pembelajaran lintas budaya
- Mendistribusikan manfaat secara adil dalam anggota masyarakat
- Melibatkan anggota masyarakat dari awal pada setiap aspek
- Meningkatkan kualitas hidup
- Melestarikan karakter unik kawasan dan budaya lokal
- Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia
- Memberikan persentase tetap atas kontribusi pendapatan dari program/ kegiatan komunitas

Pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan juga harus ditopang dengan pengelolaan pengunjung (wisatawan) yang akan berwisata di desa wisata. Pemahaman pengelola desa wisata tentang kualitas produk (destinasi wisata) dan kepuasan wisatawan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan desa wisata. Kualitas produk sebagai kunci keberhasilan ekonomi pedesaan dicirikan dengan kualitas material dan non material (misal keramahan dan pengalaman yang berkualitas). Selain itu pengelola perlu menerapkan manajemen dan monitoring yang adaptif yaitu menggunakan prinsip bahwa penggunaan sumber daya berkelanjutan sebagai prinsip dasar manajemen dan monitoring yang mencukupi.

3.4. Pengembangan Usaha Berbasis Hasil Pemetaan dan *Assessment*

3.4.1. Desa Cageur

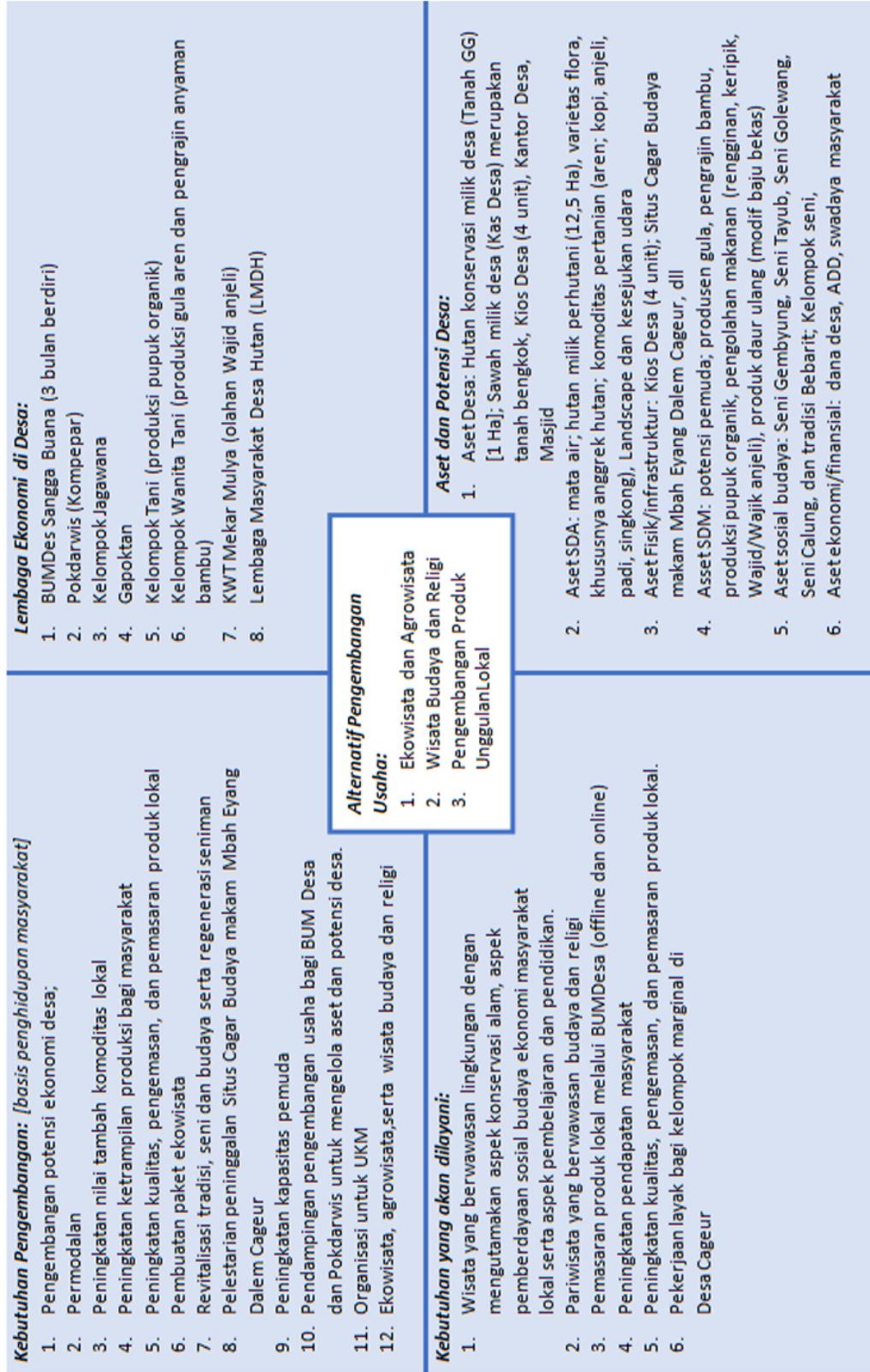
Berdasarkan hasil kajian persoalan, kebutuhan, serta aset dan potensi desa untuk penentuan alternatif pengembangan usaha seperti ditunjukkan Gambar 3.2 nampak bahwa Desa Cageur, Kecamatan Darma memiliki potensi untuk mengembangkan ekowisata, wisata budaya dan religi, dan pengembangan produk unggulan lokal. Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan (edukasi). Konservasi alam sudah mengakar di kehidupan masyarakat Desa Cageur. Desa ini memiliki hutan lindung seluas 1 Ha berupa tanah GG dan di wilayah desa terdapat hutan milik perhutani seluas 12,5 Ha dengan mata air, varietas flora, khususnya anggrek hutan. Masyarakat Desa Cageur memiliki kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Selain itu, komoditas pertanian (aren, kopi, anjeli, padi, singkong), *landscape* dan kesejukan udara pegunungan.

Pengembangan ekowisata menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mengembangkan ekonomi di Desa Cageur yang selama ini membutuhkan upaya-upaya pengembangan potensi ekonomi desa melalui peningkatan nilai tambah potensi dan komoditas lokal. Pengembangan ekowisata memiliki efek pengganda ekonomi yang sangat besar dan akan menggerakkan semua aset dan potensi ekonomi Desa Cageur. Melalui pengembangan ekowisata dan pengembangan produk unggulan lokal maka kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok marjinal, dapat ditingkatkan. Upaya ini tentu saja membutuhkan modal, keterampilan produksi, peningkatan kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran produk lokal.

Pengembangannya membutuhkan pengemasan paket ekowisata yang menarik, revitalisasi tradisi, seni dan budaya, upaya pelestarian peninggalan Situs Cagar Budaya Makam Mbah Eyang Dalem Cageur. Pendampingan pengembangan usaha bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) perlu dilakukan agar mereka mampu mengelola program pengembangan ekonomi lokal melalui ekowisata dan pengembangan produk unggulan lokal. Selain itu

perlu peningkatan kapasitas lembaga-lembaga ekonomi di desa seperti kelompok Jagawana, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga-lembaga ini penting untuk ditingkatkan kapasitasnya karena pada dasarnya pengembangan ekowisata membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ekowisata, wisata budaya dan religi, dan pengembangan produk unggulan lokal harus memberikan akses dan kesempatan bagi kelompok marginal untuk terlibat dan mendapatkan manfaat.

Gambar 26. Analisis Penentuan Alternatif Pengembangan Usaha Desa Cageur



3.4.2. Desa Sakerta Timur

Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan No. 050/KPTS.59 – Bappeda/2019, Desa Sakerta Timur Kecamatan Darma ditetapkan menjadi Desa Wisata Pinunjul dengan fokus pada Ekowisata. Hal ini sejalan dengan hasil kajian persoalan, kebutuhan, serta aset dan potensi desa untuk penentuan alternatif pengembangan usaha seperti ditunjukkan Gambar 3.2 di mana Desa Sakerta Timur, Kecamatan Darma memiliki potensi untuk menjadi desa wisata dengan disertai pengembangan produk unggulan lokal. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993).

Desa ini sebenarnya sudah memiliki konsep yang akan dikembangkan yaitu “Kampung Tumaritis”. Namun sayangnya konsep tersebut belum mampu diterjemahkan dengan baik menjadi konsep pengembangan Desa Wisata. Kampung Tumaritis sejauh ini hanya diterjemahkan dalam bentuk kompleks kampung yang dibangun di atas tanah kas desa yang berisi bangunan untuk pertemuan, panggung pertunjukan, saung, dan fasilitas lain. Sayangnya nuansa Sunda dengan konsep Kampung Tumaritis belum muncul. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa, BUM Desa, Pokdarwis dan masyarakat untuk mewujudkan Desa Wisata “Kampung Tumaritis di Sakerta Timur.

Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata yang harus disiapkan oleh Desa Sakerta Timur. *Pertama*, akomodasi yaitu sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. *Kedua*, atraksi yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa Sunda, bertani, membajak sawah dan lain-lain yang spesifik. Konsep pertama sebenarnya sudah dimiliki oleh Desa Sakerta Timur yaitu adanya kompleks Kampung Tumaritis dan homestay warga. Namun, konsep kedua yaitu atraksi kehidupan keseharian masyarakat Sunda belum mampu diwujudkan dalam sebuah paket desa wisata Kampung Tumaritis.

Menurut Edward Inskeep, dalam *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*, memberikan definisi: Wisata pedesaan di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Konsep inilah yang sebenarnya harus mampu diwujudkan di Desa Sakerta Timur.

Pengembangan dari desa wisata Kampung Tumaritis harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua

pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata. Terdapat tiga pendekatan pasar dalam pengembangan suatu Desa Wisata yang dapat dipilih (https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata). *Pertama*, interaksi tidak langsung di mana dalam model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, seni dan budaya lokal, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya. *Kedua*, interaksi setengah langsung dalam bentuk-bentuk *one day trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk. *Ketiga*, interaksi langsung di mana wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama dan kedua.

Berdasarkan tiga pendekatan pasar dalam pengembangan desa wisata maka Desa Sakerta Timur sebaiknya menggunakan pendekatan ketiga mengingat mereka sudah memiliki kompleks Kampung Tumaritis dan homestay yang dikelola oleh warga. Kompleks Kampung Tumaritis dapat difungsikan sebagai kampung yang dapat dijadikan tempat tinggal dan atraksi kehidupan keseharian masyarakat Sunda. Area-area lain di wilayah desa juga dikembangkan untuk menjadi spot-spot kehidupan keseharian masyarakat Sunda, seperti, persawahan, perkebunan, kolam, pusat produksi warga, dll yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Wisatawan dapat memilih akomodasi tinggal di kompleks Kampung Tumaritis maupun tinggal di homestay yang disediakan warga.

Jika dikelola dengan benar maka Desa Sakerta Timur potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata kriteria tipe *one day trip* atau tipe tinggal inap karena mampu memenuhi kriteria yang diperlukan yaitu baik dari aspek atraksi wisata, jarak tempuh, besaran desa, sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, ketersediaan infrastruktur. Masing-masing kriteria tersebut ada atau dapat dipenuhi oleh Desa Sakerta Timur.

Pendekatan fisik pengembangan desa wisata perlu dilakukan di Desa Sakerta Timur sebagai solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi. Jika memungkinkan mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut. Pilihan lainnya adalah mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa tersebut yang

dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil misalnya mengembangkan aset wisata seperti: kerajinan, tarian adat, rumah-rumah tradisional, dan pemandangan ke arah Waduk Darma. Landscape serta bentuk dan arsitektur Kampung Tumaritis perlu dikonversi menjadi sebuah perkampungan Sunda skala kecil di dalam lingkungan Desa Sakerta Timur dengan atraksi-atraksi budaya yang unik. Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, restaurant, kolam renang, peragaan kerajinan atau produk lokal, persawahan, kebun dan dermaga perahu di Waduk Darma dikelola sendiri oleh penduduk desa setempat melalui kelembagaan Pokdarwis yang dinaungi oleh BUM Desa.

Pengembangan Desa Wisata Kampung Tumaritis harus menerapkan prinsip dasar dari pengembangan desa wisata. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa. Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki. Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional Sunda yang lekat pada suatu desa atau "sifat" atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjunginya. Pengembangan desa wisata juga harus mampu memberikan kesempatan bagi kelompok marginal di desa untuk memiliki akses dalam pengelolaan maupun mendapatkan manfaat dari pengembangannya. Pengembangan desa wisata ini juga harus diintegrasikan dengan pengembangan budaya lokal dan pengembangan ekonomi lokal.

Gambar 27. Matriks Penentuan Alternatif Pengembangan Usaha Desa Sakerta Timur

<p>Kebutuhan Pengembangan: [basis penghidupan masyarakat]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi desa Sakerta Timur menjadi Desa Wisata yang Pinunjul 2. Dukungan usaha dan organisasi bagi UKM 3. Penguasaan teknologi tepat guna pertanian 4. Peningkatan ketrampilan produksi bagi masyarakat 5. Peningkatan kualitas, pengemasan, dan pemasaran produk lokal 6. Pemanfaatan lahan Perhutani untuk Budidaya komoditas 7. Ekowisata dan wisata budaya dan religi 8. Peterjemahan konsep dan nilai "Kampung Tumaritis" 9. Pembuatan paket wisata "Kampung Tumaritis" 10. Revitalisasi tradisi, seni dan budaya 11. Kurangnya kesediaan dan ketersediaan SDM pemuda mengelola potensi ekonomi desa. 12. Pendampingan kelembagaan dan pengembangan usaha bagi BUM Desa dan Pokdarwis 	<p>Lembaga Ekonomi di Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUMDesa (tidak berjalan/dibekukan) 2. Pokdarwis/Kompepar tidak berjalan 3. KWT Mekar Karya (holistikultura) 4. Kelompok Tani (8), salah satunya usaha saprotan 5. Gapoktan 6. Lembaga Masyarakat Desa Hutan - LMDH (tidak jalan) 7. Pansimas
<p>Alternatif Pengembangan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wisata Budaya Kampung Tumaritis 2. Pengembangan produk unggulan lokal 	<p>Aset dan Potensi Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Desa: Kantor dan Toko BUM Desa, Kios desa (10 unit) 2. Aset SDA: Hutan Perhutani (32 Ha), <i>landscape</i> persawahan, pantai waduk darma, dan kesejukan udara, padi, kopi, cengkeh, umbi-umbian, sayuran 3. Aset fisik/Infrastruktur: Infrastruktur Kampung Tumaritis, Homestay (18 rumah), kolam ikan pribadi (100 lebih), sirkuit motor (terbengkalai), bumi perkemahan, kolam renang (terbengkalai), kolam pemancingan 4. Aset SDM: keterampilan bertani, berkebun, beternak, mengolah makanan (sale, keripik umbi-umbi, kue tradisional, es krim gula aren, rengginan), kerajinan anyaman bambu (vakum), kerajinan kursi custom, dan Pemuda kurang. 5. Aset Sosial-budaya: Kelompok seni (belum tertata), calung, jaipong, gembuyung, babarit, makam leluhur 6. Aset Ekonomi/Finansial: Dana Desa, ADD, swadaya masyarakat
<p>Kebutuhan yang akan dilayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pariwisata berbasis budaya agraris Sunda (Kampung Tumaritis) 2. Akomodasi wisata khas desa/Sunda 3. Atraksi wisata khas Sunda (pertunjukan, permainan tradisional) 4. Peningkatan pendapatan masyarakat 5. Peningkatan kualitas, pengemasan, dan pemasaran produk lokal. 6. Pekerjaan layak bagi kelompok marginal di Desa Sakerta Timur 7. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan lahan Perhutani dengan skema Perhutanan sosial/kemitraan kehutanan 	<p>Aset dan Potensi Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Desa: Kantor dan Toko BUM Desa, Kios desa (10 unit) 2. Aset SDA: Hutan Perhutani (32 Ha), <i>landscape</i> persawahan, pantai waduk darma, dan kesejukan udara, padi, kopi, cengkeh, umbi-umbian, sayuran 3. Aset fisik/Infrastruktur: Infrastruktur Kampung Tumaritis, Homestay (18 rumah), kolam ikan pribadi (100 lebih), sirkuit motor (terbengkalai), bumi perkemahan, kolam renang (terbengkalai), kolam pemancingan 4. Aset SDM: keterampilan bertani, berkebun, beternak, mengolah makanan (sale, keripik umbi-umbi, kue tradisional, es krim gula aren, rengginan), kerajinan anyaman bambu (vakum), kerajinan kursi custom, dan Pemuda kurang. 5. Aset Sosial-budaya: Kelompok seni (belum tertata), calung, jaipong, gembuyung, babarit, makam leluhur 6. Aset Ekonomi/Finansial: Dana Desa, ADD, swadaya masyarakat

3.5. Penyusunan *Prototype* Bisnis Model

Prototype model bisnis yang akan dikembangkan di masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan *Business Model Canvas* (BMC) dan pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Bisnis model disusun dengan menggunakan hasil kajian persoalan, kebutuhan, aset, dan potensi desa. Prinsip-prinsip pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi lokal yang inklusif juga digunakan dalam penyusunan bisnis model ini. Bisnis model ini masih merupakan *prototype* yang perlu dikembangkan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan di masing-masing desa maupun pemangku kepentingan yang lain seperti pemerintah daerah Kabupaten Kuningan

3.5.1. Desa Cageur

1. *Prototype* Bisnis Model

Prototype model bisnis yang akan dikembangkan di Desa Cageur adalah ekowisata. Proposisi nilai (*value proposition*) yang akan dikembangkan merupakan potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Cageur yaitu hutan lindung, kesejukan udara di desa, kekayaan flora berupa tumbuhan hutan, terutama anggrek, komoditas unggulan yaitu kopi dan anjeli. Proposisi nilai yang ditawarkan “CAGEUR, Ekowisata Hutan Lindung dan Agrowisata dalam keramahan Budaya Sunda”. Proposisi nilai ini sifatnya masih usulan yang dapat didiskusikan kembali sebelum ditetapkan menjadi proposisi nilai dari bisnis model ekowisata Desa Cageur. Berdasarkan proposisi nilai ini kemudian dapat disusun elemen-elemen dari bisnis model kanvas. *Prototype* bisnis model ekowisata Desa Cageur dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini.

Gambar 28. Prototype Bisnis Model Ekowisata Desa Cageur

Business Model Canvas		Dibuat untuk: Desa Cageur	Didesain oleh: IRE	Tgl: Versi: 1
<p>Mitra Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasok Bahan & Peralatan • Petani lokal • Pengarjin • Komunitas (Jagawana, Poktan, KWT, Kelompok Seni Budaya, dll) • UKM Lokal • Pengrajin Souvenir • Pemilik Lahan (Masyarakat dan Perhutani) • BUM Desa • LMDH • Pemandu Wisata • Operator Sarana Aktivitas Wisata • Pelaku Usaha Akomodasi • Pengelola Kawasan Wisata Waduk Darma • Agen wisata • Pokdarwis • Dll. 	<p>Aktivitas Utama</p> <p>Ekowisata Hutan Cageur Agrowisata (kopi, hanjeli, anggrek) Camping ground Seni Budaya dan religi Kuliner dan olahan pangan Kerajinan</p> <p>Sumber Daya Utama</p> <p>Sumber Daya Manusia: <ul style="list-style-type: none"> • Pemandu Wisata Profesional • Juru Parkir • Penjaga loket • Pelaku seni • Penyelenggara event • Customer Service • dll Infrastruktur dan fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> • Area Parkir dan rest area • Trek dan jelajah hutan • Arena bermain (spot foto, gardu pandang, gazebo, rumah pohon, ayunan, hammock) • Camping Ground • Pusat Konservasi anggrek • Perluasan area perkebunan kopi dan hanjeli bagi </p>	<p>Proposisi Nilai</p> <p>CAGEUR, Ekowisata Hutan Lindung dan Agrowisata dalam keramahan budaya Sunda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisata berwawasan lingkungan • Wisata konservasi alam • Wisata edukasi • Pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal • Kekayaan flora, terutama anggrek hutan • Hutan lindung/keramat • Bumi Perkemahan • Kuliner khas Sunda • dll 	<p>Hubungan Pelanggan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan Komunitas • Konservasi • Pemberian souvenir: kaos, stiker, gantungan kunci • Dokumentasi • Pelayanan discount, gift bagi rombongan • Penyediaan makanan dan snack <p>Saluran Distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosial media • Brosur, majalah, media elektronik, media social, internet • Pemilik Usaha (Agen Travel & Travel, Perhotelan, Event Organizer) • Event lokal, nasional, maupun internasional • Corporate, akademi, atau instansi pemerintah • Komunitas 	<p>Segmen Pelanggan</p> <p>Wisatawan Domestik: <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai/komunitas konservasi • Pelajar/mahasiswa • Keluarga Wisatawan asing Traveller dengan minat</p>

	<p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toko cinderamata jajanan tradisional • Peralatan kesenian dan budaya • Panggung/arena pertunjukan seni budaya • Fasilitas wisata tempat ibadah & toilet umum dan pusat informasi • Pakaian tradisional • Jaringan Jalan desa dan lingkungan • Akomodasi/homestay • Restoran • Sarana Keamanan • Pusat Informasi Wisata • dll 			
Aliran Pendapatan				
<p>Struktur Biaya</p> <p>Biaya Tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan fasilitas & organisasi pengelola • Pembelian peralatan • Pemasangan signage/rambu • Pembuatan fasilitas toilet • Penyediaan area parkir • Gaji karyawan <p>Biaya Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana • Biaya penyelenggaraan event • Biaya training • Dll 		<p>Penjualan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjualan makanan dan minuman • Retribusi masuk/Ticketing • Penjualan souvenir • Penjualan bibit dan pupuk • Penjualan paket wisata 	<p>Fee/Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fee Jasa pemanduan • Penyewaan lapak di rest area • Penggunaan wahan/spot <p>Penyewaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjualan peralatan tracking/hiking, 	

2. Mekanisme Pembagian Peran

Pelaksanaan setiap aktivitas utama dalam bisnis model ekowisata Desa Cageur membutuhkan kerja sama dari para pihak. Rumusan skema kerja sama dan mekanisme pembagian peran untuk salah satu aktivitas utama dari bisnis model misalnya pada aktivitas ekowisata yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 6. Mekanisme Pembagian Peran dalam Aktivitas Utama Ekowisata Hutan Cageur

Aktivitas Utama: Ekowisata Hutan Cageur	Pemerintah		Investor/Swasta	Masyarakat	
	Daerah	Desa		Individu	Koperasi/Kelompok/BUM Desa
Peran Pengusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan penataan infrastruktur lingkungan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan konservasi hutan Pembangunan fasilitas wisata tempat ibadah & toilet umum. Rest area dan Parkir Pembangunan Trek dan jelajah hutan Pembangunan arena bermain (spot foto, gardu pandang, gazebo, rumah pohon, ayunan, hammock) Camping Ground Agrowisata kopi dan anjeli Pusat Konservasi anggrek Pelatihan bagi BUMDesa dan Pokdarwis Revitalisasi seni budaya desa 	Perhutani KRPH Haurkuning: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian hak pemanfaatan jasa lingkungan Perlindungan dan konservasi hutan Perhutanan Sosial (PS) 	<ul style="list-style-type: none"> Stand penjualan Souvenir khas daerah Stand penjualan makanan & minuman Peralatan permainan air Pemandu wisata <p>* Perlu memprioritaskan kesempatan berusaha bagi kelompok marginal di desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan ekowisata hutan Cageur Pengelolaan rest area Pengelolaan paket wisata Pengelolaan fasilitas Pengelolaan event Pengelolaan arena bermain
Manfaat	Retribusi	Retribusi PA Desa		Pendapatan	Pendapatan pengelolaan wisata, event, dan fasilitas pendukung
Skema	APBD	APB Desa			
Promosi	Promosi wisata daerah	Web site desa			Promosi paket ekowisata kerjasama dengan agen tour

3.5.2. Desa Sakerta Timur

1. *Prototype Bisnis Model*

Prototype model bisnis yang akan dikembangkan di Desa Sakerta Timur adalah ekowisata. Proposisi nilai (*value proposition*) yang akan dikembangkan merupakan potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Sakerta Timur yaitu kompleks Kampung Tumaritis, kesejukan udara di desa, landscape pedesaan, komoditas unggulan yaitu padi, kopi, dan hortikultura. Proposisi nilai yang ditawarkan “SAKERTA Timur, Desa Wisata Budaya dengan konsep “Kampung Tumaritis”. Proposisi nilai ini sifatnya masih usulan yang dapat didiskusikan kembali sebelum ditetapkan menjadi proposisi nilai dari bisnis model ekowisata Desa Sakerta Timur. Berdasarkan proposisi nilai ini kemudian dapat disusun elemen-elemen dari bisnis model kanvas. *Prototype* bisnis model ekowisata Desa Sakerta Timur dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini.

Gambar 29. Prototype Bisnis Model Ekowisata “Kampung Tumaritis” Desa Sakerta Timur

Business Model Canvas		Dibuat untuk: Desa Sakerta Timur	Didesain oleh: IRE	Tgl: Versi: 1
Mitra Utama	Aktivitas Utama	Proposisi Nilai	Hubungan Pelanggan	Segmen Pelanggan
<ul style="list-style-type: none"> Pemasok Bahan & Peralatan Petani lokal Komunitas (Poktan, KWT, Kelompok Seni Budaya, dll) UKM Lokal Pengrajin Souvenir Pemilik Lahan (Masyarakat dan Perhutani) BUM Desa LMDH Pemandu Wisata Operator Sarana Aktivitas Wisata Pelaku Usaha Akomodasi Pengelola Kawasan Wisata Waduk Darma Agen wisata Pokdarwis Dli. 	<ul style="list-style-type: none"> Kampung Tumaritis (mengkonsep ulang kampung) Bumi Perkemahan dengan paket edukasi budaya Sunda. Seni Budaya dan religi Homestay Kuliner dan olahan pangan lokal Kerajinan dll <p>Sumber Daya Utama</p> <p>SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemandu Wisata Profesional Pengelola Kampung Tumaritis Juru Parkir Penjaga loket Pelaku seni Penyelenggara event Customer Service dll <p>Infrastruktur dan fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Redesign bangunan dan fasilitas di kompleks Kampung Tumaritis Spot-spot destinasi desa wisata (sawah, empang, dll Arena bermain (spot foto, saung, permainan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata berwawasan kehidupan keseharian masyarakat Sunda Wisata bertema Kampung Sunda (Tumaritis) Wisata edukasi Pemberdayaan sosial budaya Pengembangan ekonomi masyarakat lokal Kuliner khas Sunda Bumi Perkemahan dll 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan Komunitas budaya Sunda Pemberian souvenir: kaos, stiker, gantungan kunci Dokumentasi Pemberian discount, gift bagi rombongan Penyediaan makanan dan snack dll <p>Saluran Distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosial media Brosur, majalah, media elektronik, media social, internet Pemilik Usaha (Agen Travel & Travel, Perhotelan, Event Organizer) Event lokal, nasional, maupun internasional Perusahaan, akademi, atau instansi pemerintah Komunitas dll 	<p>Wisatawan Domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pegiat/komunitas budaya Pelajar/mahasiswa Keluarga <p>Wisatawan asing</p> <p>Traveller dengan minat dll</p>

	<p>Sunda, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Camping Ground • Toko cinderamata jajanan tradisional • Peralatan kesenian dan budaya • Jaringan Jalan desa dan lingkungan • Pengelolaan • Akomodasi/homestay • Restoran/kuliner tradisional • Sarana Keamanan • Pusat Informasi Wisata • dll 			
Aliran Pendapatan				
<p>Struktur Biaya</p> <p>Biaya Tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovasi dan Pembuatan fasilitas & organisasi pengelola • Pembelian peralatan • Pemasangan sign/rambu • Gaji karyawan • dll <p>Biaya Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana • Biaya penyelenggaraan event • Biaya training bagi pengelola • dll <p>Penjualan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjualan makanan dan minuman • Retribusi masuk/Ticketing • Penjualan souvenir • Penjualan paket wisata • dll <p>Fee/Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fee Jasa pemanduan • Penyewaan lapak di Kampung Tumartitis • Penggunaan wahan/spot • Jasa akomodasi (homestay) • dll <p>Penyewaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjualan peralatan tracking/hiking • Penyewaan ruang • dll 				

2. Mekanisme Pembagian Peran

Pelaksanaan setiap aktivitas utama dalam bisnis model ekowisata Desa Sakerta Timur membutuhkan kerja sama dari para pihak. Rumusan skema kerja sama dan mekanisme pembagian peran untuk salah satu aktivitas utama dari bisnis model misalnya pada aktivitas ekowisata yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 7. Mekanisme Pembagian Peran dalam Aktivitas Utama Ekowisata Kampung Tumaritis

Aktivitas Utama: Kampung Tumaritis	Pemerintah		Investor /Swasta	Masyarakat	
	Daerah	Desa		Individu	Koperasi/Kelompok/BUM Desa
Peran Pengusahaan	Pembangunan dan penataan infrastruktur lingkungan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Renovasi dan redesign kompleks Kampung Tumaritis Penyediaan lahan Pembangunan arena bermain (spot foto, saung, permainan tradisional Sunda, dll) Pelembagaan BUM Desa dan Pokdarwis Pelatihan bagi pengelola wisata (BUMDesa dan Pokdarwis) Pengembangan kelompok seni dan budaya Peningkatan kapasitas UKM di Desa 	Perhutani: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian hak pemanfaatan jasa lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Stand penjual Souvenir khas daerah/desa Stand penjual makanan dan minuman Pemandu wisata Pelaku atraksi wisata <p><i>* Perlu memprioritaskan kesempatan berusaha bagi kelompok marginal di desa</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Kampung Tumaritis Pengelolaan paket wisata Pengelolaan fasilitas Pengelolaan event dll
Manfaat	Retribusi	Retribusi PA Desa		Pendapatan	Pendapatan dari pengelolaan wisata, event, dan fasilitas pendukung
Skema	APBD	APB Desa			
Promosi	Promosi wisata daerah	Web site desa			Promosi paket ekowisata kerjasama dengan agen tour

3.6. Skema Kerja Sama Antar Pihak

Alternatif skema kerja sama antar pihak yang dapat dikembangkan oleh pemerintah Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur dalam rangka pengembangan desa wisata dapat dilihat pada Tabel 3.3. Kewenangan desa harus menjadi pemandu dalam memilih skema kerja sama yang akan dibangun untuk pengembangan wisata di kedua desa ini. Pemerintah (daerah dan desa) dapat menjalin kerja sama dengan swasta dengan berbagai skema tapi dengan harus sesuai dengan regulasi prinsip-prinsip yang saling menguntungkan semua pihak dan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa, khususnya bagi kelompok marjinal.

Tabel 8. Alternatif Skema Kerja Sama antar Pihak

Bentuk Skema Kerjasama	Keterangan
BOT (<i>Build, Operate, Transfer</i>)	Peran pihak swasta membangun, mengoperasikan fasilitas, dan mengembalikannya ke pemerintah desa setelah masa konsesi/kontrak berakhir.
BTO (<i>Build, Transfer, Operate</i>)	Peran pihak swasta membangun, menyerahkan asetnya ke pemerintah desa dan mengoperasikan fasilitas sampai masa konsesi/kontrak berakhir.
ROT (<i>Rehabilitate, Operate, Transfer</i>)	Peran pihak swasta memperbaiki, mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah desa setelah masa konsesi/kontrak berakhir.
BOO (<i>Build, Own, Operate</i>)	Peran swasta membangun kemudian menjadi pemilik fasilitas dan mengoperasikannya.
O & M (<i>Operation and Maintenance</i>)	Untuk kasus khusus, pemerintah membangun, swasta mengoperasikan dan memelihara.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pembangunan Kawasan Waduk Darma yang sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan program strategis yang penting disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Desa maupun warga desa pada umumnya, khususnya desa-desa yang berada di kawasan Waduk Darma, termasuk Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur, dua dari 19 desa yang berada di Kecamatan Darma.

Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur adalah desa yang posisinya dekat dengan Waduk Darma yang sedang dalam proses revitalisasi. Kedua desa ini memiliki potensi pengembangan ekonomi yang luar biasa untuk dapat mendukung Pembangunan Kawasan Waduk Darma. Desa Cageur memiliki potensi untuk mengembangkan ekowisata, wisata budaya dan religi, dan pengembangan produk unggulan lokal. Sedangkan Desa Sakerta Timur memiliki potensi untuk menjadi desa wisata dengan disertai pengembangan produk unggulan lokal.

Namun demikian, meski memiliki potensi pendukung untuk pengembangan wisata berbasis kawasan, terdapat pula berbagai tantangan atau persoalan yang perlu mendapat perhatian, baik pada aspek kebijakan, kelembagaan maupun kapasitas individu.

Pertama, pada aspek kebijakan, hingga saat ini potensi pengembangan ekonomi yang ada di dua desa ini belum terfasilitasi dengan kebijakan yang kuat dan spesifik. Meski Desa Sakerta Timur sudah memiliki konsep Kampung Tumaritis, namun konsep tersebut belum diterjemahkan secara kuat dalam kebijakan lokal. Sedangkan Desa Cageur, kebijakan yang ada belum secara kuat mengarah pada konsep pengembangan ekonomi lokal, sehingga program yang ada pun belum terfokus kegiatan-kegiatan pengembangan wisata desa.

Kedua, pada aspek kelembagaan, kedua desa relatif belum memiliki kelembagaan yang kuat untuk dapat mendukung PEL. Meski terdapat BUM Desa akan tetapi kinerjanya masih terbilang lemah. Desa Cageur berpotensi dapat didorong untuk percepatan penguatan kelembagaan karena terdapat sumber daya manusia berupa kelompok muda yang memiliki komitmen untuk mengembangkan wisata dan ekonomi desa. Sedangkan Desa Sakerta Timur masih harus melakukan identifikasi aktor yang tepat dan mendorong penguatan kelembagaan yang mampu menerjemahkan konsep tentang Kampung Tumaritis untuk dapat mendukung pengembangan wisata kawasan Waduk Darma.

Ketiga, meski sudah ada produk lokal yang diproduksi di tingkat desa, namun produk lokal ini belum terkonsolidasi dan terorganisir dengan baik. Ada juga persoalan packaging dan pemasaran yang perlu mendapat perhatian dan intervensi program pemerintah desa.

Keempat, tatakelola usaha ekonomi di desa saat ini belum secara kuat mengusung nilai-nilai inklusifitas dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Keberlanjutan dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekowisata, sehingga perspektif *sustainable development* menjadi nilai penting dalam PEL yang akan digagas.

4.2. Rekomendasi

4.2.1. Integrasi Kawasan dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur harus memperhatikan rencana pembangunan Kawasan Waduk Darma, sehingga dapat bersinergi dengan rencana program di tingkat kawasan, serta bersinergi juga dengan desa-desa sekitar. Sinergi ini penting terlembagakan dalam desain Pembangunan Kawasan Perdesaan, dimana inisiatif lokal harus diperkuat sesuai dengan potensi yang ada di tingkat desa dan kawasan. RPJM Desa dan RKP Desa harus sudah memasukkan rencana pengembangan ekonomi lokal yang mendukung pembangunan Kawasan Waduk Darma, termasuk penyusunan masterplan di tingkat desa sehingga arah pembangunan desa lebih konkret dan jelas, serta sudah siap diimplementasikan.

4.2.2. Peningkatan Kapasitas Lokal

Pada aspek kelembagaan dan kapasitas perlu segera dipersiapkan secara detail dan sistematis. Penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa menjadi rekomendasi penting dalam studi ini, mengingat masih lemahnya kelembagaan ekonomi yang ada, baik di Desa Cageur maupun Desa Sakerta Timur. BUM Desa diharapkan mampu menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam program pengembangan ekonomi lokal, sehingga dibutuhkan revitalisasi dan reorientasi kelembagaan.

Selain itu, dibutuhkan juga literasi yang kuat terkait dengan ide dan gagasan pengembangan ekonomi lokal di tingkat warga dan pelaku usaha, agar dapat beradaptasi dengan rencana pengembangan usaha desa, baik yang ditujukan untuk mendukung dan memperkuat sektor pariwisata maupun pengembangan produk ekonomi desa.

4.2.3. *Fasilitasi Pemda*

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), mengingat kewenangan PKP berada di tingkat Daerah, Provinsi maupun Pusat. Pada konteks PKP di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan perlu menyusun kebijakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Waduk Darma disertai dengan regulasi turunannya. Masterplan di tingkat kabupaten juga dibutuhkan guna semakin memperjelas intervensi program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersinergi dengan program pembangunan di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten juga perlu memfasilitasi koordinasi kerjasama multipihak guna memastikan peran dan sinergi antar aktor yang terlibat dalam PKP di Kecamatan Darma.

4.2.4. *Roadmap Implementasi Bisnis Model*

Peta jalan (*roadmap*) implementasi bisnis model pengembangan ekonomi di Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur meliputi strategi pentahapan pengembangan usaha/bisnis dan rancangan rencana implementasi. Strategi pentahapan sebaiknya menggunakan dua fase yaitu fase inkubasi dan pematapan. Pada fase inkubasi perlu mengkaji ulang hasil pemetaan kebutuhan pengembangan usaha, aset, dan potensi desa serta prototype bisnis model yang telah disusun. Proses ini membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga ekonomi di desa, dan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal di desa. Strategi pentahapan pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. *Strategi Pentahapan Pengembangan Usaha*

FASE INKUBASI (2021 – 2023)

“Pematapan Ekowisata”

- Penguatan identitas ikon utama desa wisata
- Pemenuhan fasilitas ekowisata
- Penguatan kelembagaa
- Inisiasi kemitraan
- Fase Pematapan

FASE PEMANTAPAN (2023 – 2025)

“Penguatan Peran dan Pengembangan Bisnis Ekowisata”

- Diversifikasi produk unggulan
- Pengembangan aktivitas pendukung
- Regenerasi dan revitalisasi atraksi
- Peningkatan daya dukung
- Perluasan pasar

2. **Rencana Implementasi**

Rencana implementasi bisnis model pengembangan usaha unggulan di Desa Cageur dan Desa Sakerta Timur adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Promosi

- 1) Pendampingan dan penyusunan *Community Action Plan*
- 2) Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan usaha
- 3) Penyusunan rencana teknis (DED)
- 4) Pembuatan media promosi dan jalinan komunitas wisata
- 5) Perencanaan penataan dan pembangunan
- 6) Perencanaan saluran pemasaran dan promosi paket lainnya

b. Peningkatan Kapasitas dan Jejaring

- 1) Pemantapan kelembagaan desa
- 2) Pemberdayaan Pengembangan Pelaku Usaha Wisata kepada masyarakat
- 3) Pemberdayaan Pengembangan Pelaku Usaha wisata dan pendukung pariwisata desa kepada masyarakat
- 4) Pemberdayaan Pengembangan Desa Wisata kepada masyarakat
- 5) Promosi investasi bagi pembangunan destinasi
- 6) Kerjasama Kemitraan dengan BUMN dan Swasta (dana CSR)

c. Pembangunan Infrastruktur

- 1) Pembangunan Fasilitas
- 2) Pengadaan Alat dan Bahan

Daftar Pustaka

- Aini, W., 2016, *Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Berorientasi Pemberdayaan Perempuan*, Universitas Negeri Padang
- Chambers, R. and Conway, R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. IDS discussion paper.
- Creswell, John W., 2010, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- David J. Teece, 2010, *Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning*, Volume 43, Issues 2-3, 2010.
- Flick, Uwe, 1998, *An Introduction to Qualitative Research*, London, Sage Publication
- Franches Hutchinson, et al, 2002, *The Politics of Money: Towards Sustainability and Economic Democracy*, Pluto Press, London, Pg. 161.
- IRE, 2020, *Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Inklusif*, IRE Yogyakarta.
- Midgley, James. (1995). *Social development. The development perspective in social welfare*. London: Sage Publication
- Munir, R., 2007, *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Jakarta, Local Governance Support Program (LGSP)
- Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3)
- Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves., 2010, *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challenger*, Wiley.
- Peter P. Rogers, et all, 2007, *An Introduction to Sustainable Development*, Earthscan Publications Ltd., London.
- Todaro, M. P., Smith, S. C. 2011, *Pembangunan Ekonomi Jilid I (11th ed.)*, Jakarta: Erlangga.
- Warsilah, H., 2015, *Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial*

Perkotaan: Kasus Kelompok Marginal di Kampung Semanggi, Solo Jawa Tengah, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 17 No. 2

Website

Penerapan Business Model dan Business Plan dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia, Asisten Deputi Manajemen Strategis. <https://www.scribd.com/document/444564449/51Business-Model-Business-Plan-Pariwisata-pdf>,

Kebijakan dan Regulasi

BPS Kabupaten Kuningan, 2019, Statistik Daerah Kabupaten Kuningan

Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembangunan Desa

Perda No.7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023

Perbup No 1 tahun 2019 tentang Desa Pinunjul Kabupaten Kuningan

Profil Desa Cageur, 2019

RPJM Desa Cageur, 2019-2025

Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09,
Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581
Telp: 0274-867686
E-mail: office@ireyogya.org
Website: www.ireyogya.org